

BAB IV

ALASAN JEPANG MENYEPAKATI REVISI *JAPAN-US DEFENSE*

GUIDELINES 2015

Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan mengenai latar belakang Jepang menyetujui revisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015. Bahwa keputusan Jepang menyetujui *Guidelines 2015* dengan mempertimbangkan perubahan dinamika politik internasional yang berkembang pada saat itu yang menimbulkan terjadinya dilemma keamanan. Perubahan iklim lingkungan keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur sangatlah mempengaruhi keputusan Jepang tersebut. Sebagai respon atas perubahan yang terjadi, keputusan Jepang merevisi *Guidelines 2015* sebagai upaya meningkatkan pertahanan Jepang dan menghadapi tantangan isu keamanan baru di kawasan melalui penguatan kerjasama dengan Amerika Serikat. Menurut penulis, terdapat dua alasan yang mendorong Jepang menyetujui revisi *Japan-US Defense Guidelines 2015* yaitu pertimbangan akan adanya potensi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara.

A. Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok dan Agresifitasnya di Kawasan Asia Timur

Tantangan keamanan kawasan Asia Timur dalam konteks strategis saat ini telah mengalami perubahan. Akhir tahun 1990-an yang menjadi topik utama isu keamanan di Asia Timur masih menyangkut konflik Semenanjung Korea dan konflik selat Taiwan pada saat itu. Memasuki tahun 2000-an, iklim keamanan Asia Timur mengalami perubahan, konflik yang sebelumnya terjadi tidak lagi eksis

seperti sebelumnya. Jika konflik Semenanjung Korea terus berlanjut maka *Guidelines* 1997 masih relevan untuk digunakan. Hal inilah mengapa *Guidelines* 1997 tidak dapat diaplikasikan lagi karena skema *Guidelines* 1997 diperuntukkan untuk menanggapi isu berbentuk konflik dan terjadi dalam radius *situation in area surrounding Japan* (SIASJ). (Takahashi, 2013, p. 8)

Perubahan iklim keamanan di Asia Timur yang sangat signifikan terasa pada tahun 2010-an. Perubahan ini mempengaruhi situasi politik dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Timur hingga luar kawasan, bahkan sampai menjadi perhatian dunia internasional. Terpuruknya Korea Utara saat itu dianggap lebih buruk ketimbang ancaman invasi Korea Utara melawan Korea Selatan, dan terjadinya pertikaian antara Jepang dan Tiongkok di Laut China Timur yang merupakan ancaman lebih besar terhadap stabilitas kawasan Asia Timur dibandingkan dengan konflik selat Taiwan. (Takahashi, 2013, p. 8) Tidak hanya itu, tensi antara Jepang dan Tiongkok meningkat seiring dengan meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok. Negara tirai bambu ini begitu agresif dalam ekspansi kekuatan militernya terlebih klaim penuhnya atas Laut China Timur dan Laut China Selatan. Agresifitas Tiongkok inilah yang akhirnya membuat Jepang mempertimbangkan adanya potensi ancaman dari Tiongkok atas kedaulatan Jepang dan stabilitas regional Asia Timur.

Dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul *Upgrading the Japan-US Defense Guidelines: Toward a New Phase of Operational Coordination* yang ditulis oleh peneliti ahli tentang kebijakan keamanan Jepang, Sugio Takahashi, memaparkan tantangan keamanan baru yang dihadapi Jepang dalam bentuk zona

abu-abu atau *gray zone*. Keputusan Jepang merevisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015 tidak terlepas dari transformasi lingkungan keamanan global yang terjadi sejak tahun 2000. *Japan-US Defense Guidelines* 1997 yang merupakan pembaruan dari *Japan-US Defense Guidelines* 1978 hanya merefleksikan lingkungan keamanan yang terjadi pada era 1990-an. *Guidelines* 1997 pun dianggap tidak sesuai dengan kondisi lingkungan keamanan yang mengalami perubahan pada tahun 2000-an. Situasi lingkungan keamanan yang dihadapi Jepang sejak tahun 2000-an dapat dikatakan dalam skema zona abu-abu atau “*gray zone*”. Istilah *gray zone* sendiri mendeskripsikan suatu keadaan dimana tidak dalam keadaan damai dan juga tidak dalam keadaan perang secara bersamaan. Pada awalnya menurut pandangan teori *deterrence* konvensional tantangan yang muncul dalam suatu isu keamanan dipahami dalam bentuk tindakan invasi militer atau serangan militer (*arm attack*) oleh suatu negara ke negara lain secara langsung. Namun dewasa ini, transformasi situasi lingkungan keamanan yang terjadi menggeser paradigma tentang tantangan isu keamanan global yang terjadi dalam skema *gray zone*. Tantangan isu keamanan berpola *gray zone* yang saat ini dihadapi Jepang adalah adanya konflik atau persengketaan Laut China Timur dan Laut China Selatan serta ancaman aktivitas uji coba nuklir yang melibatkan dua negara tetangga Jepang yakni Tiongkok dan Korea Utara (Takahashi, 2013)

1. Kapasitas Militer Tiongkok

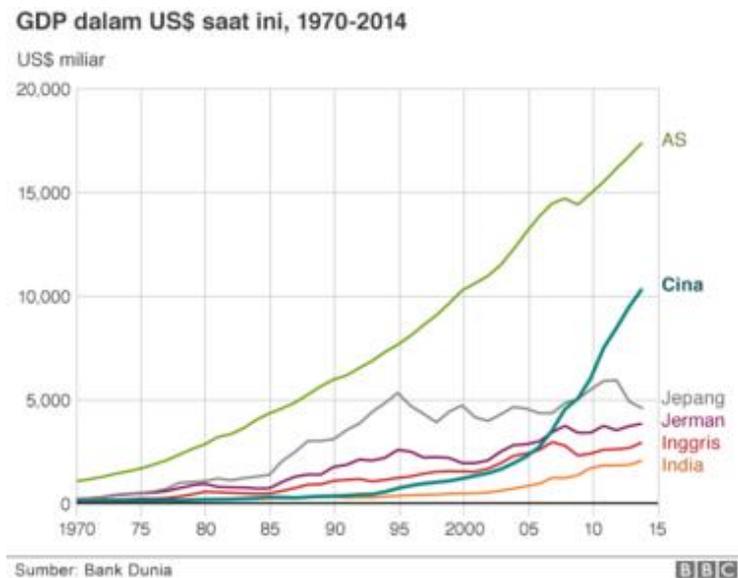
Jepang melihat bahwa kapasitas militer yang dimiliki Tiongkok saat ini dapat berpotensi menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan kedaulatan Jepang dan stabilitas kawasan Asia Timur. Kekhawatiran Jepang semakin bertambah karena

anggaran pertahanan Tiongkok yang terus bertambah seiring dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok yang semakin membaik. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok akan dapat menjelma sebagai kekuatan baru dalam skala global dan regional.

a. Tiongkok dalam Politik Internasional

Tiongkok muncul sebagai kekuatan baru di kancah global diikuti dengan pertumbuhan perekonomian yang pesat dan kekuatan pertahanan militer Tiongkok yang semakin meningkat. Dalam kurun waktu seperempat abad, Tiongkok yang notabene berideologi komunis-sosialis berhasil mensejajarkan kekuatan ekonominya dengan negara-negara barat. Kesuksesan Tiongkok meramu ideologi dengan sistem perekonomian kapitalis ini dapat mengangkat pertumbuhan perekonomian Tiongkok hingga menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dengan berbagai kemungkinan di masa depan akan melampaui negara adidaya tersebut. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen kuat Partai Komunis Tiongkok yang menjadi tonggak pemerintahan Tiongkok untuk menjaga stabilitas domestik. Terwujudnya stabilitas dalam negeri inilah yang akhirnya mendorong Tiongkok mampu untuk sampai pada pencapaian pertumbuhan perekonomian yang pesat dalam skala global. (Wirawan & Subekti, 2012, p. 6)

Gambar 4. 1 Gross Domestic Product (GDP) Global Tahun 1970-2014



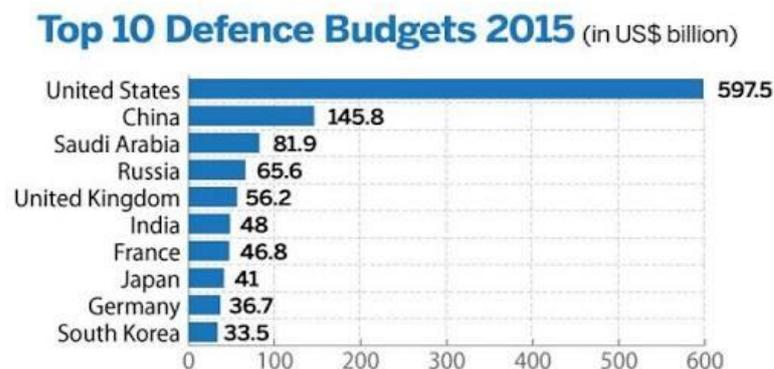
Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_cina

Diketahui dari grafik diatas, pada tahun 2014 GDP Tiongkok menduduki posisi kedua setelah Amerika Serikat, kemudian di bawahnya di susul oleh Jepang yang berada di posisi ketiga kemudian Jerman, Inggris dan India. Sejak tahun 1970 hingga tahun 2010 pencapaian prosentase rata-rata GDP Tiongkok sebesar 10%. Masuk sebagai lima besar negara dengan GDP tertinggi di dunia, kekuatan Tiongkok tidak dapat dipandang sebelah mata di kacamata global. Kesuksesan ini tidak terlepas dari peran Partai Komunis Tiongkok yang notabene sebagai ujung tombak pemerintahan Tiongkok yang memberlakukan sistem pasar pada tahun 1978 hingga akhirnya Tiongkok dapat membuka diri untuk menerima investasi asing pada tahun 1980-an. (Jeavans, Qurashi, Offer, Cheung, & Zanni, 2015) Dalam dokumen yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, data menunjukkan bahwa hingga pada tahun 2015 Tiongkok tetap mempertahankan sebagai pemegang posisi kedua GDP secara

global setelah Amerika Serikat dengan jumlah lebih dari \$11 milyar. (World Bank, 2017)

Seiring dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok, pemerintah Tiongkok menaruh perhatian lebih terhadap sektor militernya. Konsentrasi tersebut diwujudkan dalam suatu kebijakan pertahanan Tiongkok untuk melindungi dan menjaga stabilitas kedaulatan Tiongkok beserta segala sumber ekonomi negara tersebut. Hal ini terlihat secara nyata bahwa anggaran belanja militer Tiongkok meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang fantastis. Pemerintah Tiongkok memberikan porsi yang besar untuk modernisasi postur militer Tiongkok. (Wirawan & Subekti, 2012, p. 8) Tentunya, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok tersebut selaras dengan pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang ditandai dengan peningkatan GDP Tiongkok setiap tahunnya. Sebagai negara dengan perolehan GDP tertinggi kedua di dunia, suatu hal yang wajar bila Tiongkok menempatkan konsentrasinya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara melalui peningkatan anggaran belanja militer. (Jakarta Greater, 2014)

Gambar 4. 2 Sepuluh Besar Anggaran Pertahanan Negara Tahun 2015



Sumber: <http://www.gcmfg.com/defense-budget-capture-technical-resume-business/840/>

Diagram diatas menunjukkan pada tahun 2015 jumlah anggaran pertahanan Tiongkok sebesar \$145,8 milyar dan berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Besaran anggaran ini cukup fantastis walaupun nilai dua kali lipatnya pun belum dapat menyamai anggaran pertahanan milik Amerika Serikat. Dari diagram diatas juga terlihat bahwa jumlah anggaran Jepang sebesar \$41 milyar dan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggaran pertahanan Tiongkok. Dengan demikian Tiongkok akan dapat mewujudkan keinginannya untuk melakukan revolusi secara komprehensif terhadap angkatan bersenjata Tiongkok sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ketua parlemen Tiongkok Le Keqiang dalam sebuah sidang parlemen tahunan. Selain itu pemerintah Tiongkok juga berkomitmen untuk melakukan modernisasi serta upaya meningkatkan kinerja serta kapabilitas kemampuan tempur pasukan bersenjata Tiongkok untuk menghadapi suatu ancaman. (Jakarta Greater, 2014)

Dalam Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok, perwujudan pembangunan pertahanan militer Tiongkok akan diselenggarakan secara berkelanjutan mengiringi pertumbuhan perekonomian Tiongkok secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Tiongkok mengawal pengeluaran belanja pertahanan agar terjaga dalam nilai yang berada dalam batas wajar dan terkendali agar dapat menjaga stabilitas politik serta perekonomian dalam negeri Tiongkok. Upaya peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dari tahun ke tahun diperuntukkan untuk memenuhi kelima tujuan utama militer Tiongkok yaitu terwujudnya keamanan rezim, integrasi teritorial, penyatuan nasional, keamanan maritime dan stabilitas regional. (Wirawan & Subekti, 2012)

Upaya mewujudkan tujuan militer Tiongkok dapat dilakukan dengan cara memenuhi segala kebutuhan militer mulai dari anggaran, persenjataan dan serangkaian postur militer lainnya. Kebijakan peningkatan anggaran militer Tiongkok dari tahun ke tahun yang terus meningkat bukan tanpa maksud. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Tiongkok, peningkatan anggaran militer ditujukan untuk memenuhi berbagai pembiayaan yang dibutuhkan oleh sektor militer Tiongkok diantaranya untuk pembiayaan sebagai berikut;

(1) personil dan sistem pengaman sosial, (2) reformasi struktural dan organisasi dalam tubuh pasukan militer Tiongkok yakni *People's Liberation Army (PLA)*, (3) kerjasama dan aksi internasional, (4) investasi penciptaan "*high-caliber talents in the military*". (Wirawan & Subekti, 2012, p. 9)

Pengalokasian anggaran pertahanan Tiongkok diperuntukkan untuk tiga jenis pengeluaran utama yakni sektor personil, pelatihan dan perawatan, serta peralatan dalam postur militer Tiongkok. Kebijakan pemerintah Tiongkok tersebut dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk mempertahankan prinsip hak dan kepentingan maritime. Dengan demikian terciptalah sebuah korelasi yang signifikan dimana Tiongkok yang berada pada posisi ekonomi yang baik dan terus meningkat akan semakin memperkuat eksistensinya melalui pengembangan kapabilitas militernya. Besarnya anggaran pertahanan Tiongkok yang terus meningkat setiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan Tiongkok muncul menjadi sebuah kekuatan baru tidak hanya sebatas di kawasan regional Asia Timur namun dapat mengeksplorasi kekuatan militernya secara global. Kondisi inilah yang membuat Tiongkok memiliki kepercayaan diri lebih dalam persaingan dengan negara-negara di regional Asia Timur. (Wirawan & Subekti, 2012, p. 11)

Tiongkok melakukan peremajaan dan modernisasi terhadap postur militernya serta perubahan doktrin operasional militer dalam *People's Liberation Army* (PLA). (Andhika, 2013, p. 2) Walaupun sebelumnya pada tahun 1989 akibat dari terjadinya tragedi Tiannanmen, Tiongkok mendapat sanksi embargo senjata dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun bukan berarti Tiongkok tidak dapat melakukan modernisasi pada sistem persenjataan. Tiongkok membelokkan arah kerjasama militernya ke Rusia yang akhirnya berhasil menjadi suplier persenjataan Tiongkok terbesar dengan nilai prosentase penjualan senjata ke Tiongkok sebesar 95%. Suplai persenjataan yang dikirimkan ke Tiongkok antara lain;

1. Pesawat tempur Su-30 dan Su-37
2. Misil udara (*Air to Air Missiles/ AAMs*) AA-12
3. Sistem misil ke permukaan udara (*Surface to Air Missiles/ SAM*), SA-10, SA-15, SA-20
4. 3M-54E (SS-N-27B) ASCMs
5. Kapal selam kelas – KILO
6. Kapal selam penghancur kelas-II Sovremenny
7. Pesawat tempur transport II-76
8. Pesawat tempur tanker IL-78
9. Sistem penggabungan senjata (Satris, 2015, p. 98)

Selain mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembelanjaan dan pengembangan persenjataan seperti yang telah disebutkan diatas, pada tahun 2012 Tiongkok membangun kapal induk, pesawat tempur yang tidak dapat terdeteksi oleh radar dan mengembangkan rudal yang dapat menembak jatuh satelit walaupun dalam tes uji coba masih butuh optimalisasi beberapa tahun untuk dapat dioperasikan secara maksimal. (Lisbet, 2012, p. 6) Hingga pada tahun 2013 Tiongkok juga berhasil memproduksi kapal selam diesel-listrik (SONG) yang dapat meluncurkan misil dari bawah laut serta berhasil meng-*upgrade* persenjataan lainnya. (Andhika, 2013, p. 3) Tabel berikut ini akan memberikan gambaran jenis

peralatan militer Tiongkok baik pada sektor, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai berikut;

Tabel 4. 1 Jenis Peralatan Militer Tiongkok

Angkatan	Jenis Peralatan
Angkatan Darat	31.300 senjata berbasis darat 16.000 mortir 14.000 meriam 8.200 tank 7.700 senjata anti-pesawat 6.500 senjata kendali anti tank 5.000 kendaraan pengangkut pasukan 2.400 sistem peluncur roket 1.700 senjata pendorong
Angkatan Laut	1.882 unit kapal pengangkut 760 unit kapal perang 368 unit kapal patrol 121 unit kapal amfibi 68 unit kapal selam 42 fregat 39 unit kapal penyapu ranjau 21 unit kapal penghancur 8 pelabuhan utama 1 unit pengangkut pesawat
Angkatan Udara	1900 unit pesawat 491 unit helikopter 67 unit lapangan udara

Sumber: Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV, No. 05/I/P3DI yang berjudul

Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok

Peningkatan kapasitas militer juga menjadi agenda Tiongkok, yang mana perhatiannya berubah arah fokus pada optimalisasi pembangunan Angkatan Laut dan Udara dibandingkan Angkatan Darat. Proses optimalisasi tersebut didukung oleh kapasitas personil militer Tiongkok itu sendiri yang terdiri dari 2.255.000 tentara aktif, 800.000 tentara cadangan dan 3.969.000 paramiliter aktif. (Lisbet, 2012)

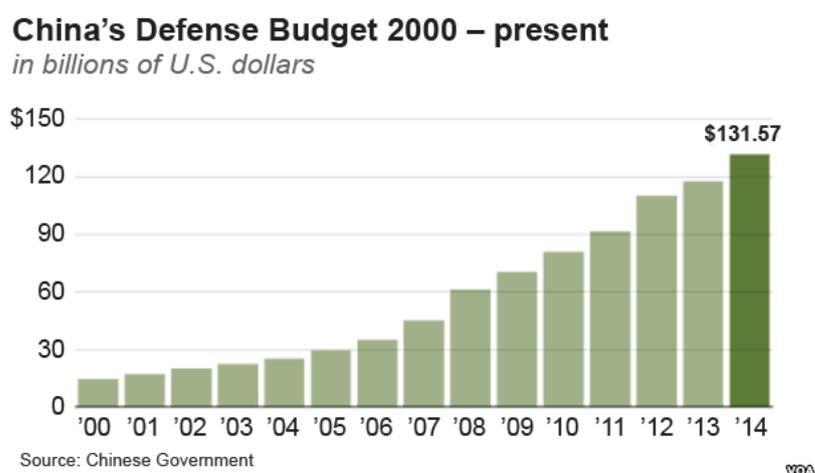
Pada sisi yang lain, doktrin pertahanan Tiongkok sangat mempengaruhi kebijakan militer Tiongkok. Doktrin pertahanan tersebut merupakan bagian vital dalam kebijakan militer Tiongkok meliputi perencanaan, implementasi, dan strategi perlawanan dalam sebuah peperangan. Evolusi doktrin pertahanan Tiongkok terlihat dalam 4 rumusan yaitu *People's War*, *People's War Under Modern Condition*, *local/Limited War*, dan *Local/Limited War Under High Technology Conditions*. Doktrin pertahanan Tiongkok pada awalnya merupakan warisan dari Mao Zedong yang mengkonsepkan sebuah doktrin militer *People's War* dan *Active Defense* sebagai strategi militer sebagai panduan dijalankannya kebijakan militer Tiongkok. Dalam perkembangannya, doktrin tersebut tidak relevan untuk diaplikasikan. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, doktrin pertahanan Tiongkok diperbaharui menyesuaikan kondisi politik keamanan yang terjadi pada saat itu sehingga terciptalah doktrin baru berupa *People's War Under Modern Conditions*. Walaupun berkali-kali mengalami evolusi terhadap doktrin pertahanan Tiongkok, dewasa ini doktrin pertahanan Tiongkok dalam babak baru. Sesuai yang terdapat dalam Buku Putih Pertahanan Tiongkok, kebijakan pertahanan Tiongkok berorientasi pada; (a) penegakkan keamanan dan persatuan nasional, (b) penjaminan kepentingan pembangunan nasional, (c) pencapaian di semua bidang, (d) pembangunan yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari kekuatan bersenjata serta keamanan nasional Tiongkok, (e) peningkatan kinerja angkatan bersenjata dengan informalisasi sebagai ukuran utama, (f) penerapan strategi pertahanan aktif, (g) pengejaran strategi pertahanan negara dengan nuklir dan pengembangan lingkungan keamanan Tiongkok yang kondusif untuk mendukung perkembangan Tiongkok yang damai.

Pemerintah Tiongkok juga memiliki rumusan panduan strategi militer pertahanan secara aktif guna menghadapi perkembangan situasi keamanan internasional yang dirancang untuk meraih kemenangan perang lokal di era informasionalisasi. (Wirawan & Subekti, 2012)

b. Tiongkok sebagai Kekuatan Terbesar di Asia Timur

Peningkatan kapasitas militer Tiongkok yang terjadi tiap tahun berhasil memposisikan diri sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Timur. Dapat diartikan pula bahwa pada saat ini Tiongkok adalah negara terkuat di Asia Timur. Terdapat kemungkinan yang cukup besar Tiongkok akan terus menambah kapasitas militernya hingga dapat mewujudkan ambisinya untuk menguasai dunia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi pada anggaran pertahanan Tiongkok yang terus meningkat dalam kurun waktu 14 tahun terakhir sejak tahun 2000.

Gambar 4. 3 Anggaran Pertahanan Tiongkok Tahun 2000-2014



Sumber: <http://jakartagreater.com/anggaran-pertahanan-Tiongkok-2014/>

Berdasarkan diagram diatas, didapat informasi bahwa anggaran pertahanan Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping sejak tahun 2000 setiap tahunnya meningkat. Tercatat pada tahun 2014, anggaran militer Tiongkok mencapai angka tertinggi sebesar \$131,5 milyar dengan nilai prosentase sebesar 12,2% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (Jakarta Greater, 2014)

Pertumbuhan dan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok yang terjadi setiap tahunnya menjadi pertimbangan bagi Jepang untuk merumuskan kebijakan keamanan Jepang. Hal itu disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Jepang yang disahkan pada awal Agustus 2014 sebagai mekanisme pelaksanaan sistem pertahanan Jepang. Buku Putih Pertahanan Jepang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1970 dan sejak tahun 1976 Pemerintah Jepang secara berkala memperbaharui buku tersebut. Buku Putih setebal 500 halaman tersebut memuat empat cakupan pertahanan Jepang yang terdiri dari lingkungan Jepang, kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, inisiatif pertahanan Jepang, serta pertahanan Jepang. Di dalam Buku Putih Pemerintah Jepang menyebutkan Tiongkok sebagai salah satu ancaman di Laut China Timur. Bahwa perkembangan militer Tiongkok yang baru-baru ini mengalami peningkatan dengan segala kecanggihan postur militer yang dimilikinya, dan agresifitas Tiongkok di Laut China Timur merupakan ancaman nyata bagi Jepang. Dengan demikian kebijakan pertahanan Jepang mengarah pada konflik Laut China Timur, melindungi kedaulatan yakni kepulauan Senkaku dan menitik beratkan perhatian kepada agresifitas militer Tiongkok di kawasan tersebut. Buku Putih tersebut memiliki efek penggetar atau *deterrence* untuk Tiongkok yang merupakan keuntungan tersendiri bagi Jepang. (Roza, 2014, p. 6)

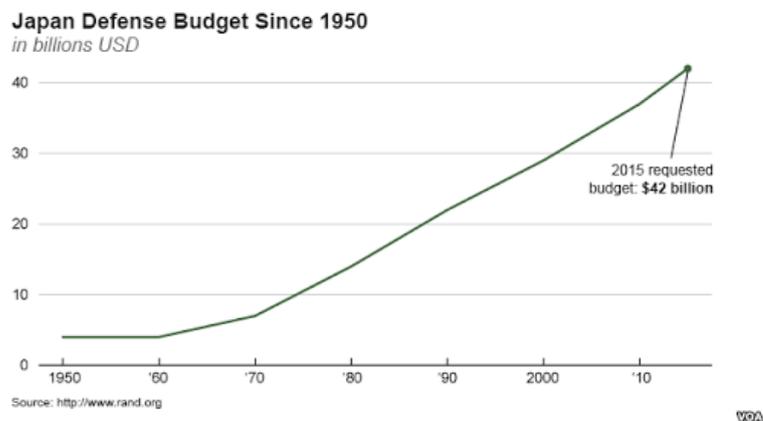
Melalui mekanisme pertahanan yang tertulis dalam Buku Putih, peran militer Jepang atau pasukan SDF diperluas jangkauannya tidak hanya di Laut China Timur. Perluasan jaringan tersebut dalam rangka menjalin kerjasama militer dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Vietnam, Filipina, dan Australia yang notabene juga berkonflik dengan Tiongkok. Jepang berusaha menyamakan persepsi dengan negara-negara tersebut bahwa Tiongkok merupakan ancaman. Ketika Jepang dan negara yang berpotensi menjadi sekutunya memiliki pandangan yang sama bahwa peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang tidak transparan tersebut adalah ancaman, maka memungkinkan terciptanya kerjasama yang menguntungkan. Jika benar akan terjalin sebuah aliansi baru maka akan ada kerjasama yang lebih erat untuk menghadapi musuh bersama dalam bentuk pertukaran informasi intelejen, *collective self defense* seperti Jepang dan Amerika Serikat, serta dapat juga berupa kerjasama triangular atau trilateral. (Roza, 2014, p. 7)

Buku Putih Pertahanan Jepang juga memuat tentang keinginan Pemerintah Jepang untuk melakukan pemaknaan ulang atau reinterpretasi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menjadi landasan pasifisme militer Jepang selama ini. Dengan adanya amandemen Pasal 9 maka militer Jepang dapat aktif seperti militer yang dimiliki oleh negara normal. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang selama ini berlaku sebagai aliansi yang juga menjadi payung militer Jepang. Aktifnya kembali militer Jepang secara otomatis akan berdampak pada *sharing budget* antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi sepadan. Sebagai bagian dari strategi Jepang menghadapi ancaman Tiongkok di Laut China Timur,

Jepang menyepakati revisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015. Diketahui bahwa *Guidelines 2015* memuat mekanisme dan cakupan kerjasama yang lebih luas serta deskripsi pembagian tugas antara Jepang dan Amerika Serikat lebih jelas. Hal ini akan memberikan dampak yang positif untuk aliansi Jepang dan Amerika Serikat yang lebih erat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian regional Asia Timur.

Jepang terus berupaya meningkatkan kapasitas militernya, hal ini juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghadapi dan mengimbangi kekuatan militer Tiongkok. Setiap tahun Jepang menambah besaran anggaran pertahanan Jepang yang tentunya untuk meningkatkan mutu personil SDF dan persenjataan serta fasilitas militer termasuk logistik dan transportasi. Peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang semakin besar tiap tahunnya tidak terlepas dari melonggarnya Pasal 9 Konstitusi Jepang yang semakin memperluas peran militer Jepang untuk menghadapi isu keamanan yang terjadi.

Gambar 4. 4 Anggaran Pertahanan Jepang Sejak tahun 1950-2015



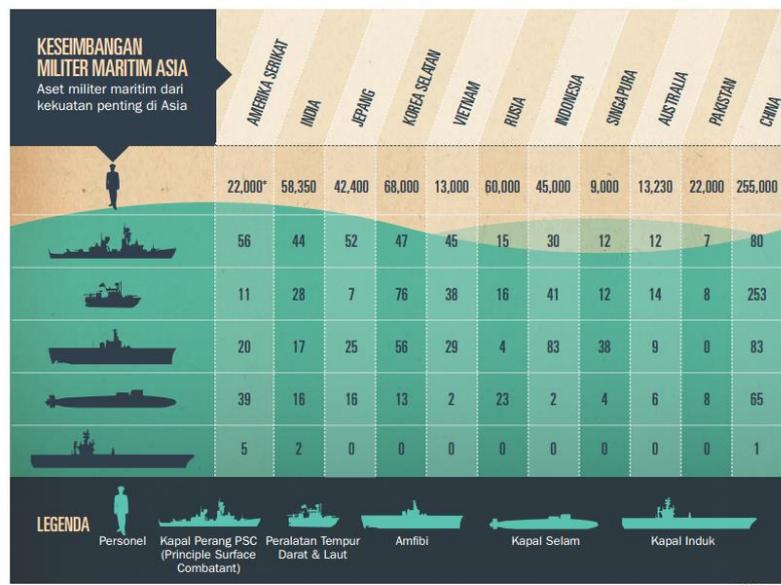
Sumber: <http://www.voanews.com/a/japan-cabinet-approves-third-straight-defense-boost/2597568.html>

Berdasarkan gambar grafik diatas, anggaran pertahanan Jepang terus meningkat sejak tahun 1950. Anggaran pertahanan Jepang mencapai \$42 milyar pada tahun 2015 dan merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah pertahanan Jepang pasca Perang Dunia II berakhir. Dibawah komando Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, kenaikan anggaran pertahanan tahun 2015 sebesar 2% dari tahun sebelumnya ditujukan untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di sekitar Jepang – termasuk potensi ancaman Tiongkok. Anggaran pertahanan Jepang yang baru dialokasikan untuk pembelian 20 pesawat patroli laut, 5 pesawat *crosscover*, 3 pesawat tanpa awak (*drone*), 6 pesawat siluman, dan rencana pembelian 30 unit amfibi. (Shamil & Hendra, 2015)

Dilihat dari sudut pandang keseimbangan militer maritim di Asia khususnya Asia Timur, kekuatan maritim Tiongkok adalah yang terbesar. Hal ini terlihat dari jumlah aset militer maritime yang dimiliki Tiongkok dibandingkan dengan aset militer maritime negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur. Perbandingan keseimbangan tersebut berdasarkan banyaknya jumlah aset militer maritim yang dimiliki masing-masing negara yakni dari segi personil, kapal perang PSC (*Principle Surface Combatant*), peralatan tempur darat dan laut, amfibi, kapal selam, dan kapal induk. Jepang sendiri memiliki 42.400 personil, 52 kapal perang PSC, 7 peralatan tempur darat dan laut, 25 amfibi, 16 kapal selam dan 0 kapal induk. Sedangkan jika dibandingkan dengan aset militer maritim yang dimiliki oleh Tiongkok, Jepang masih tertinggal jauh. Tiongkok memiliki 255.000 personil, 80 kapal perang PSC, 253 peralatan tempur darat dan laut, 83 amfibi, 65 kapal selam dan 1 kapal induk. Disisi lain, Amerika Serikat yang notabene aliansi Jepang

memiliki aset militer maritim yang berbasis di perairan Asia Timur. Amerika Serikat memiliki 22.000 personel, 56 kapal perang PSC, 11 peralatan tempur darat dan laut, 20 amfibi, 39 kapal selam dan 5 kapal induk. Walaupun jika aset militer maritim Jepang dan Amerika Serikat digabungkan, tidak dapat mengungguli kuantitas kekuatan maritime Tiongkok di Asia Timur. Hal tersebut meningkatkan level ancaman Tiongkok di sektor maritim. Berikut gambar yang memberikan gambaran keseimbangan militer maritim di Asia, khususnya di Asia Timur. (Nankivell, Asia Suatu Restropektif Maritim, 2015, p. 14)

Gambar 4. 5 Keseimbangan Militer Maritim Asia



Sumber: "The Military Balance," International Institute for Strategic Studies 2014
 *Tentara yang dikerahkan maju di Asia dan Pasifik; angka tidak termasuk pasukan yang berbasis di A.S. yang mendukung kawasan ini.

Sumber: Jurnal Asia Pasifik Defense FORUM Volume 40, Terbitan ke-1 tahun 2015 oleh Kerry Lynn S. Nankivell

Jepang khawatir terhadap kebangkitan kekuatan militer Tiongkok yang diprediksi akan menjadi raksasa militer Asia. Dengan melihat catatan sejarah selama ini, terdapat tiga kondisi yang memungkinkan Jepang menghadapi Tiongkok sebagai ancaman secara langsung. Pertama, jika pecah konflik bersenjata

antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, maka Jepang dapat terlibat langsung dalam konflik tersebut karena dalam perkembangan cakupan aliansi Jepang dan Amerika Serikat dalam taraf *collective security*. Kedua, Jepang dapat terlibat dalam konflik langsung dengan Tiongkok yang timbul oleh adanya permasalahan teritorial klaim Pulau Senkaku serta perebutan sumber daya laut di perairan Laut China Timur. Ketiga, agresifitas militer Tiongkok di Laut China Selatan dan kepentingan nasional Tiongkok melalui klaim penuh atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan yang mengancam keamanan Jepang. (Andhika, 2013, p. 3)

Untuk menghadapi isu keamanan terkait potensi Tiongkok sebagai ancaman Jepang di Asia Timur, Departemen Pertahanan Jepang berupaya memaksimalkan kapasitas militer Jepang. Setelah adanya reinterpretasi Pasal 9 Konsitusi Jepang oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang semakin menonjolkan kekuatan militernya dan meluaskan peran SDF di kancah global. Kapasitas militer Jepang yang terus meningkat, prediksi bahwa Jepang memiliki peluang untuk menjadi negara terkuat di Asia dalam waktu 10 tahun mendatang sangat mungkin terjadi. Namun jika dilakukan perbandingan kekuatan militer antara Jepang dan Tiongkok saat ini, Jepang masih tertinggal jauh dari Tiongkok. Tabel berikut akan memberikan gambaran perbandingan (Shamil & Hendra, 2015)

Tabel 4. 2 Perbandingan Kekuatan Militer Jepang dan Tiongkok tahun 2015

Indikator		Jepang	Tiongkok
Anggaran Pertahanan (milyar dollar AS)		42	144,2
Sumber Daya Manusia	Populasi	127.103.388	1.355.692.576
	Tentara	53.608.446	749.610.775
	Tentara Penyerang	43.930.753	618.588.627
	Personel Garis Depan Aktif	247.173	2.333.000
Kekuatan Darat	Tank	678	9.150
	Kendaraan Lapis Baja Tempur	2.850	4.788
	Self Proppered Guns	202	1.710
	Towed Artillery	500	6.246
	Sistem Roket Multiple-launch	99	1.770
Kekuatan Udara	Pesawat	1.613	2.860
	Interceptor	289	1.066
	Fixed-wing	289	1.311
	Pesawat Transportasi	529	876
	Pesawat Trainer	432	352
	Helikopter	742	908
	Helikopter Tempur	122	196
Kekuatan Laut	Kekuatan Naval	131	673
	Frigates	0	47
	Corvettes	0	23
	Pesawat Pertahanan Pantai	6	11
	Pesawat Carrier	2	1
	Destroyer	43	25
	Kapal Selam	16	10
	Mine Warfare	29	6

Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/973848/149/jepang-Tiongkok-berlomba-perkuat-militer-1425868836/13>

Dalam suatu pernyataan, walaupun pemerintah Tiongkok berdalih bahwa peningkatan kapasitas dan anggaran militernya masih dalam taraf rendah jika dibandingkan dengan penduduk Tiongkok yang mencapai 1,3 milyar jiwa dan wilayah teritorial Tiongkok yang luas baik darat, udara, serta laut dengan garis pantai yang panjang. Namun hal ini tidak dapat mengurangi rasa kekhawatiran

Jepang atas ancaman yang mungkin akan datang. Tidak ada jaminan bahwa Tiongkok dengan militer kuat tidak akan menyerang Jepang dan membahayakan keamanan Jepang, sehingga rasional bahwa Jepang menyepakati revisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015.

2. Agresifitas Militer Tiongkok di Kawasan Asia Timur

Tiongkok telah berhasil muncul sebagai kekuatan baru di Asia dengan besarnya kapasitas militer Tiongkok yang menempati posisi kedua dalam daftar 10 negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Pada skala regional Asia Timur, kekuatan militer Tiongkok merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Dengan kapasitas militer yang semakin besar tiap tahunnya, kebijakan keamanan Tiongkok cenderung ekspansif di kawasan. Hal ini terlihat dari ambisi Tiongkok memperluas wilayah kekuasaannya di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Agresifitas Tiongkok di kedua wilayah tersebut dipandang Jepang sebagai ancaman atas keamanan Jepang dan stabilitas kawasan Asia Timur.

a. Tiongkok sebagai Ancaman di Laut Tiongkok Timur

Keyakinan Pemerintah Jepang akan datangnya ancaman dari peningkatan kapabilitas militer Tiongkok semakin kuat. Hal ini dibuktikan oleh adanya kebijakan militer Tiongkok yang mengusik pertahanan wilayah perairan Jepang di Laut China Timur. Walaupun sesungguhnya akar permasalahan yang terjadi di Laut China Timur telah ada sejak sebelum Perang Dunia II berakhir, namun dengan sikap militer Tiongkok yang agresif serta semakin kuatnya kapabilitas militer Tiongkok, hal ini semakin memperkeruh perselisihan yang selama ini terjadi. Perselisihan

yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok dapat diibaratkan seperti benang kusut, pasalnya memang bukanlah konflik bersenjata langsung. Menurut beberapa analisis tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan naik status menjadi konflik bersenjata langsung. Sentimen antara keduanya cukup sengit mengingat historis mereka yang terlibat dalam perang *Shino-Japanese War*. Tindakan agresif yang dilakukan Tiongkok ini mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur terlebih dalam wilayah perairan. Hal ini pula yang akhirnya membuat Jepang dan Amerika Serikat mulai mengadakan dialog untuk merevisi *Japan-US Defense Guidelines* pada tahun 2013.

Akar masalah dalam perselisihan Jepang dan Tiongkok adalah persoalan perebutan atau klaim terhadap kepemilikan kepulauan yang berada di Laut China Timur. Dalam pandangan Jepang, pulau Senkaku yang diperebutkan oleh kedua negara – atau yang dalam pandangan Tiongkok disebut juga dengan pulau Diaoyu, berada pada lokasi strategis di tengah-tengah antara Okinawa dan Taiwan. Konflik ini timbul pasca Perang Dunia II berakhir, walau sebenarnya kedua negara telah lama melakukan klaim jauh sebelum itu. (Roza, 2012) Ketegangan yang terjadi di wilayah perairan Laut China Timur tidak terlepas dari catatan sejarah. Konflik ini berawal dari kemenangan Jepang atas Tiongkok dalam *Shino Japanese War* pada tahun 1895. Kekalahan yang dialami Tiongkok, mengharuskan Tiongkok menyerahkan sebagian wilayahnya sebagai hak rampasan perang kepada pihak yang menang. Invasi Jepang ke Tiongkok sejak tahun 1894 membuahkan hasil, Jepang mendapatkan wilayah Taiwan termasuk kepulauan Senkaku yang diserahkan oleh Tiongkok sesuai kesepakatan Traktat Shimonoseki. Berakhirnya

Perang Dunia II tahun 1945 menjadi titik balik kekuatan kekaisaran Jepang pada saat itu. Setelah pendudukan pasukan sekutu, antara Jepang dan Amerika Serikat menyepakati perjanjian damai *San Fransisco Treaty* pada tahun 1951. Di dalam perjanjian tersebut, Jepang diharuskan mengembalikan harta rampasan perang ke negara pemiliknya termasuk Taiwan ke Tiongkok. Pada momentum inilah konflik antara Jepang dan Tiongkok memanas. (Irewati, 2012)

Klaim atas kepulauan Senkaku dinyatakan Jepang pada 14 Januari 1895 setelah melakukan peninjauan dan penelitian selama sekitar 10 tahun terhadap kepulauan tersebut sebagai pulau tak berpenghuni. Pada hari itu Jepang secara resmi memasukkan kepulauan Senkaku menjadi bagian dari wilayah territorial kedaulatan Jepang. Status pulau Senkaku menjadi bagian dari kepulauan Nansei Shoto atau kepulauan Ryuku – saat ini disebut sebagai kepulauan Okinawa. Dalam perspektif Jepang, setelah disepakatinya *San Fransisco Treaty* pengembalian Taiwan ke Tiongkok tidak termasuk kepulauan Senkaku, walaupun di sisi lain Tiongkok merasa dirugikan dan tidak terima atas hal ini. Jepang tidak menghiraukan perbedaan interpretasi yang diyakini pemerintah Tiongkok bahwa pengembalian Taiwan tersebut termasuk kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menjadi bagian dari provinsi Taiwan. Tiongkok berpegang teguh pada peta sejarah Tiongkok yang merupakan warisan dari zaman Dinasti Ming (1368-1644) bahwa kepulauan Senkaku/Diaoyu bagian dari provinsi Taiwan termasuk dalam wilayah territorial Tiongkok pada masa itu. Perihal mempertahankan eksistensi kedaulatannya, Jepang tidak peduli dengan klaim yang dilakukan Tiongkok meskipun Tiongkok menggunakan peta yang telah ada sejak 3 abad sebelum Perang

Dunia II berakhir sebagai bukti kuat kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu. (Roza, 2012)

Bertahun-tahun lamanya perselisihan antara Jepang dan Tiongkok terjadi, walau begitu Jepang tidak menganggap persengketaan ini benar-benar terjadi. Jepang merasa pada saat kesepakatan *San Fransisco Treaty* Tiongkok tidak keberatan bahwa kepulauan Senkaku ditetapkan sebagai bagian dari kepulauan Nansei Shoto dibawah kewenangan Amerika Serikat. Pada tahun 1971 Amerika Serikat memberikan kepulauan Nansei Shoto atau Okinawa ke pemerintah Jepang sebagai penanda berakhirnya pendudukan Amerika Serikat di Jepang. (Roza, 2012)

Baik Jepang maupun Tiongkok saling mempertahankan klaim wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari kedaulatan masing-masing negara. Sejak tahun 2012 perseteruan ini mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Pada September 2012, Jepang mengumumkan telah membeli kepulauan Senkaku seharga \$30 juta dari sebuah keluarga yang dianggap sebagai pemilik dari kepulauan tersebut. Jepang semakin mengukuhkan administrasi kepemilikan kepulauan Senkaku sebagai aset negara dan kedaulatan Jepang. Pembelian kepulauan Senkaku tersebut dianggap tidak sah oleh Tiongkok, Jepang dianggap mencuri wilayah kedaulatan Tiongkok. Situasi kian memanas, hingga baik Jepang maupun Tiongkok bersamaan memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan patroli perairan ketat di Laut China Timur hampir setiap minggu. Tensi tinggi antara pasukan militer kedua negara terjadi tidak hanya di wilayah perairan saja karena kapal-kapal milik Tiongkok hampir memasuki wilayah territorial Jepang, namun juga terjadi di udara. (Staf FORUM, 2015)

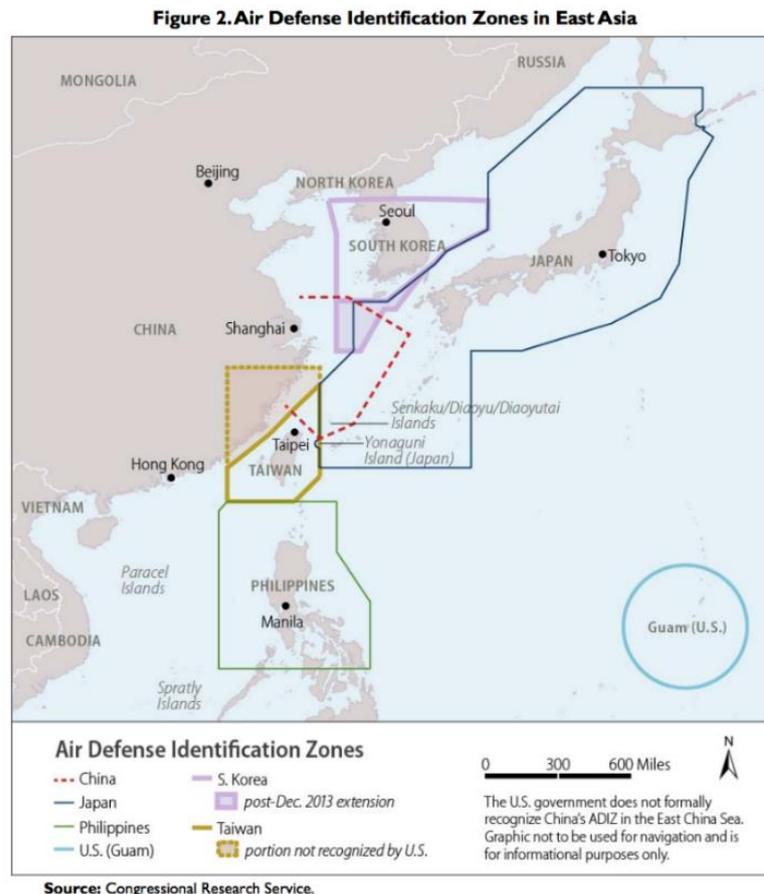
Kondisi yang berkembang semakin tidak terkontrol dimana permasalahan klaim wilayah ini menembus ranah ekonomi dan hubungan diplomatik. Perdana Menteri Jepang memanggil Duta Besar Tiongkok untuk melayangkan protes terhadap pemerintah Tiongkok yang mengirimkan kapal-kapalnya ke sekitar kepulauan Senkaku. (Roza, 2012, p. 6) Pada September 2012 Pemerintah Tiongkok mengirimkan kapal patroli di perairan Laut China Timur untuk mengukuhkan klaimnya. Sebanyak enam kapal pengintai dikirimkan Tiongkok ke wilayah perairan sekitar kepulauan Senkaku sebagai respon atas tindakan Jepang yang membeli pulau Senkaku. Patroli maritim dan pengiriman kapal pengintai ini dimaksudkan untuk mengintimidasi Jepang agar Jepang membatalkan pembelian tersebut. Tindakan yang dilakukan Tiongkok ini merupakan strateginya dalam bentuk *gunboat diplomacy*. Istilah *gunboat diplomacy* dimaknai bahwa suatu negara ingin mengintimidasi negara atau pihak lain dengan cara menggelar dan menunjukkan kekuatan militernya melalui mekanisme latihan perang atau percobaan senjata. (Ashari, 2015, p. 218)

Di dalam negeri Tiongkok, telah terjadi demonstrasi dalam skala besar yang menyuarakan protes anti-Jepang, massa yang terlibat dalam demonstrasi tersebut kemudian menyerang dua perusahaan milik Jepang yakni Panasonic dan Canon untuk menghentikan kegiatan ekonomi mereka. Jepang terpaksa merelokasi perusahaan Jepang keluar Tiongkok akibat adanya perusakan terhadap sistem produksi dan operasional perusahaan dari insiden tersebut. Ketegangan yang terjadi tidak berhenti sampai disitu, kedua negara membatalkan pertemuan peringatan 40 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok yang akan

dilaksanakan pada 27 September 2012. Jika konflik ini terus berlanjut dan tidak menemui titik terang, maka akan berdampak pada stabilitas kawasan Asia Timur bahkan Asia Pasifik (Roza, 2012)

Konflik yang terjadi kian memanas setelah Tiongkok mengumumkan memperluas jangkauan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di atas perairan Laut China Timur pada Desember 2013. ADIZ merupakan mekanisme pertahanan udara yang berisi tentang batas-batas jangkauan kedaulatan udara suatu negara dimana di dalam ADIZ itu sendiri terdapat regulasi bagi pesawat terbang asing diwajibkan untuk mengidentifikasi dirinya dan memberikan informasi rencana serta tujuan dilakukannya penerbangan tersebut. Mekanisme ADIZ memberikan keharusan terhadap pesawat yang akan memasuki dan melewati zona tersebut dengan terlebih dahulu diminta memberikan identitas diri dan informasi tujuan penerbangan, serta tetap mempertahankan kontak radio dengan pihak local yang berwenang. Klaim ADIZ Tiongkok tersebut menjadi ancaman cukup serius bagi Jepang karena skema ADIZ yang baru tersebut mencakup kepulauan Senkaku dan posisinya tersebut tumpang tindih dengan batas ADIZ milik Jepang yang telah ada sebelumnya. (Staf FORUM, 2015)

Gambar 4. 6 Air Defense Identification Zone di Laut China Timur



Sumber: Jurnal Congressional Research Service yang berjudul *Tiongkok's Air Defense Identification Zone (ADIZ)* oleh Ian E. Rinehart dan Bart Elias tahun 2015

Berdasarkan gambar diatas, jangkauan ADIZ milik Tiongkok (garis putus-putus warna merah) yang dirilis pada tahun 2013 menabrak batas ADIZ milik Jepang (garis lurus warna biru tua). Tumpang tindih antara ADIZ Jepang dan Tiongkok ini akan berdampak serius terhadap stabilitas Laut China Timur. Perluasan cakupan ADIZ milik Tiongkok meliputi kepulauan senkaku dan sebagian wilayah perairan di Laut China Timur. Dalam peta diatas juga memperlihatkan

bahwa ADIZ Tiongkok juga menabrak ADIZ milik Taiwan dan Korea Selatan. (Rinehart & Elias, 2015)

Ketegangan yang terjadi di Laut China Timur belum ada tanda-tanda mereda, sebaliknya, hingga mendekati pertengahan tahun 2014 tepatnya pada bulan Mei situasi masih memanas. Beberapa pesawat tempur milik pasukan militer maritim Tiongkok melakukan penerbangan di atas perairan Laut China Timur yang hanya berjarak 50 meter dari patroli pesawat pengintai Jepang. Jika dijumlahkan, pasukan militer maritime Tiongkok telah lebih dari seratus kali memasuki wilayah sekitar kepulauan Senkaku dengan jarak yang sangat dekat. Agresifitas Tiongkok mulai terlihat bersamaan dengan bangkitnya kekuatan militer Tiongkok. Dilihat dari sudut pandang keseimbangan militer maritim di Asia khususnya Asia Timur, kekuatan maritim Tiongkok adalah yang terbesar. (Nankivell, Asia Suatu Restropektif Maritim, 2015, p. 14)

Dibalik ketegangan yang terjadi di Laut China Timur, konflik yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok adalah tentang bagaimana kedua negara mempertahankan kepentingan nasional. Jepang meyakini bahwa klaim atas kepulauan Senkaku/Diaoyu yang dilakukan oleh Tiongkok untuk memenuhi sumber energi yang Tiongkok butuhkan. Jepang menilai klaim yang dilakukan Tiongkok sejak tahun 1970-an tersebut karena adanya sebuah penelitian mengenai sumber energi yang terdapat di Laut China Timur terutama di sekitar kepulauan Senkaku. Dalam sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1969 yang menginformasikan bahwa di wilayah kepulauan Senkaku terdapat sumber daya gas alami dan minyak. Pemerintah Tiongkok dan perusahaan milik

Tiongkok juga melakukan penelitian serupa. Pemerintah Tiongkok menemukan kemungkinan adanya 17,5 triliun kaki kubik gas alam dan 20 juta barel minyak yang mana jumlah tersebut setara dengan seperlima cadangan gas alam yang dimiliki Tiongkok. Sedangkan perusahaan Tiongkok juga mengungkapkan adanya kemungkinan 6 ladang gas di Laut China Timur yaitu ladang Chunxiao, Tianwaitian, Duanqiao, Baoyunting, Canxie dan Wuyunting yang mengandung gas alam sekitar 364 kaki milyar kubik. (Roza, 2012) Penelitian adanya sumber energi di Laut China Timur juga dipastikan juga oleh Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa di wilayah tersebut terdapat 60-100 juta barel minyak dan 28 milyar meter kubik cadangan gas alam dalam angka minimum. (Staf FORUM, 2015, p. 50)

Posisi kepulauan Senkaku yang berada di jalur perdagangan sibuk diantara Taiwan dan Okinawa menambah nilai strategis kepulauan tak berpenghuni seluas 7km² tersebut. Posisi ini menambah nilai strategis yang dimiliki kepulauan Senkaku selain kandungan sumber energi minyak dan gas yang ada disana. (Roza, 2012, p. 5) Tiga dari total lima pulau yang ada di kepulauan Senkaku menjadi perebutan, yaitu Pulau Uotsuri, Pulau Minamikojima bawah, dan Pulau Kitakojima. (Staf FORUM, 2015, p. 49)

Klaim wilayah oleh Tiongkok tidak hanya dilakukan di Laut China Timur yang menjadi ancaman langsung untuk Jepang. Tiongkok yang cenderung ekspansif juga ingin menguasai perairan Laut China Selatan yang memiliki nilai strategis di kawasan Asia Timur. Potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan

militer Tiongkok juga dirasakan Jepang menyangkut agresifitas dan klaim penuh Tiongkok atas Laut China Selatan.

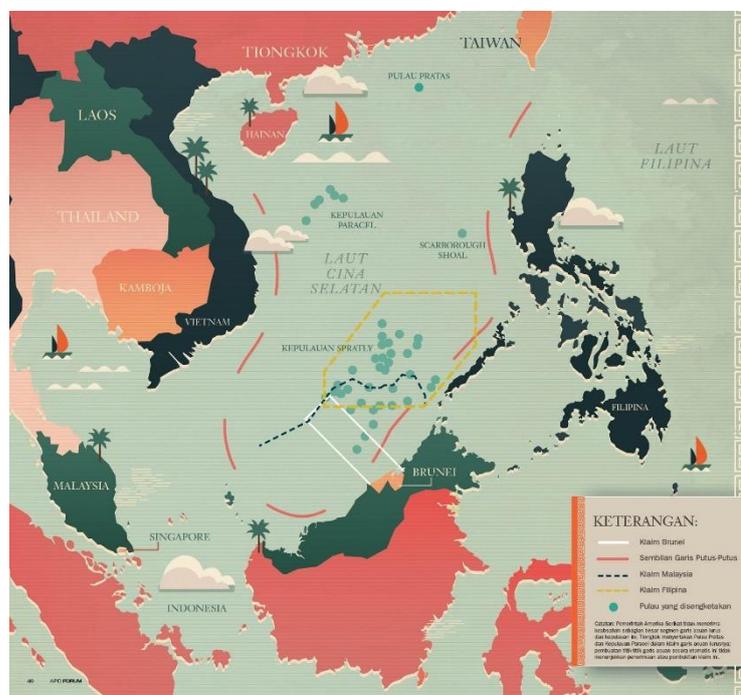
b. Tiongkok sebagai Ancaman di Laut China Selatan

Fokus perhatian isu keamanan global yang berkembang pasca berakhirnya Perang Dingin mengarah kepada pencapaian terjaminnya keamanan energi masing-masing negara. Dewasa ini kebutuhan akan sumber daya energi bagi suatu negara merupakan kebutuhan dasar sebagai bagian dari kepentingan nasional yang harus dicapai. Hal ini juga yang terjadi di Laut China Selatan yang menjadi sengketa oleh negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Persengketaan Laut China Selatan telah mengganggu stabilitas keamanan Asia Timur, terlebih lagi Tiongkok begitu agresif dalam klaim wilayah tersebut. Agresifitas Tiongkok tersebutlah yang dipandang Jepang menjadi sebuah ancaman lain selain agresifitas Tiongkok di Laut China Timur. Jepang merasa perlu menghentikan upaya Tiongkok tersebut karena selain kepentingan nasional Jepang yang terganggu di Laut China Selatan, Jepang juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan bersama dengan Amerika Serikat yang menjadi negara aliansinya sejak Perang Dunia II berakhir.

Sensitifitas yang terjadi di dalam konflik Laut China Selatan melibatkan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang melihat wilayah tersebut memiliki potensi luar biasa. Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang memiliki ratusan pulau, atoll dan gugusan karang. Aktor utama yang terlibat dalam sengketa adalah Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun

sengketa ini juga melibatkan aktor lain seperti Malaysia, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat dan Indonesia. Potensi besar yang dimiliki Laut China Selatan inilah yang diperebutkan negara-negara tersebut untuk saling memenuhi kepentingan nasional mereka. Puncak sengketa terjadi sejak tahun 2010 saat Tiongkok menyatakan klaim penuh atas wilayah Laut China Selatan menjadi bagian dari kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. (Rachmat, 2015)

Gambar 4. 7 Klaim Kedaulatan di Laut China Selatan



Sumber: <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>

Gambar di atas menerangkan klaim Tiongkok terhadap wilayah Laut China Selatan merupakan klaim penuh dan terluas dibandingkan klaim negara lain. Dalam gambar di atas, klaim Tiongkok seluas wilayah dan termasuk kepulauan yang berada di dalamnya berbentuk U (9 garis putus berwarna merah). Klaim tersebut saling tumpang tindih dengan klaim Brunei Darussalam (garis berwarna

putih), klaim Malaysia (garis putus-putus berwarna biru tua), dan klaim Filipina (garis putus-putus berwarna kuning). (Nankivell, 2016)

Terjadinya tumpang tindih klaim wilayah atas Laut China Selatan terjadi karena masing-masing negara ingin mempertahankan kepentingan nasional mereka. Klaim Tiongkok merupakan yang terbesar, hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dimasukkan ke dalam kedaulatan Tiongkok yang diidentifikasi sekitar 1500km pada garis batas pantai dari Pulau Hainan, Tiongkok. Klaim wilayah perairan Laut China Selatan termasuk di dalamnya kepulauan Spratly dan Paracel yang tidak berpenghuni namun menjadi cikal bakal wilayah yang diperebutkan mengingat posisinya yang strategis. (Wirawan & Subekti, 2012, p. 27)

Jepang bukanlah negara yang ikut melakukan klaim wilayah di perairan laut China Selatan, dan juga bukan negara yang terlibat langsung dalam persengktaan tersebut. Namun untuk menjaga kepentingan nasional Jepang yang berada di Laut China, Jepang berusaha masuk terlibat di dalamnya. Laut China Selatan memiliki stok ikan yang sangat banyak dan sumber daya energi yang melimpah bahkan wilayah tersebut merupakan cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Jepang sendiri mengandalkan dan memanfaatkan perairan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari setengah kebutuhan energi Jepang. (Cobus, 2015) Tidak hanya itu, jika kekuatan militer Tiongkok dibiarkan agresif dan menguasai Laut China Selatan secara penuh, maka kekhawatiran Jepang akan terisolasi benar terjadi. Sektor perdagangan Jepang sangat tergantung pada Laut China Selatan sebagai jalur keluar masuk kapal dagang baik dari Jepang maupun menuju ke

Jepang. Untuk menghadapi agresifitas Tiongkok di Laut China Selatan tersebut, *Maritime SDF* Jepang melakukan latihan gabungan dengan *Navy US Forces* dan Angkatan Laut Filipina di wilayah tersebut. Selain itu, Jepang juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa tersebut. (Tejomukti, 2015)

Tiongkok semakin menunjukkan dirinya sangat agresif di laut China Selatan. Setelah berhasil mengusik kedaulatan Jepang di kawasan laut China Timur dengan mempublikasikan perluasan *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* di atas perairan Laut China Timur yang menyangkut kepulauan Senkaku milik Jepang, kini Tiongkok berencana mengumumkan ADIZ-nya di Laut China Selatan. Rancangan ADIZ Tiongkok di Laut China Selatan tersebut luasnya mencakup kepulauan Paracel dan sebagian besar wilayah udara di atas perairan Laut China Selatan. Mekanisme ADIZ memberikan keharusan terhadap pesawat yang akan memasuki dan melewati zona tersebut dengan terlebih dahulu diminta memberikan identitas diri dan informasi tujuan penerbangan, serta tetap mempertahankan kontak radio dengan pihak local yang berwenang. Jika pihak yang berwenang mendapati ada yang hal yang mencurigakan atau kemungkinan membahayakan, maka pihak tersebut akan memburu dan mencegat pesawat tersebut menggunakan jet tempur. Hal inilah yang benar-benar dikecam oleh Jepang dan beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat yang merasa dirugikan dengan tindakan Tiongkok tersebut yang membatasi ruang gerak negara lain di kawasan sengketa yang sebelumnya merupakan perairan bebas. (Jia Xiang, 2014)

Permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan adalah mengenai kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim negara-negara yang terlibat. Namun keberadaan sumber daya energi yang terkandung di dalam Laut China Selatan yang menjadi motivasi dibalik perebutan wilayah ini. Keruhnya persengketaan yang terjadi dapat dianalisis dari segi ekonomi, hukum, militer dan politik. Dari segi ekonomi Laut China Selatan mengandung cadangan sumber daya energi sebanyak 28 milyar barel menurut penelitian tahun 1993/1994 yang dilakukan oleh lembaga Penelitian Geologi Amerika Serikat (*United States Geological Survey-USGS*). Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih besar dan jika diproduksi secara maksimal di wilayah kepulauan Spratly sendiri akan mencapai 180.000-370.000 barel per hari yang setara dengan tingkat produksi Brunei Darussalam tahun 2012. USGS juga memperkirakan adanya kandungan gas alam di wilayah tersebut sekitar 60%-70% dari jumlah hidrokarbon yang berada di wilayah tersebut yang dapat berkembang setiap tahunnya di masa depan. (Wirawan & Subekti, 2012, p. 28) Nilai ekonomis lainnya yakni secara geostrategis posisi Laut China Selatan berada dalam jalur perdagangan yang cukup sibuk di Asia Timur terlebih bagi Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Jalur perdagangan di Laut China Selatan memiliki nilai pasar industry mencapai \$5 triliun per tahun, angka ini merupakan jumlah yang cukup besar. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan oleh *The Wall Street Journal* nilai ekspor dan impor Amerika Serikat di Laut China Selatan mencapai \$1,2 triliun. Nilai ekonomis dan keberadaan sumber daya energi inilah yang menjadi akar permasalahan Laut China Selatan semakin pelik. (Setiawan, 2016)

Dilihat dari perspektif hukum, persengkataan Laut China Selatan adalah perbedaan interpretasi terhadap hukum laut yang di terbitkan oleh PBB. Penetapan batas garis laut yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on Law the Sea-UNCLOS III*) tahun 1982, bahwa kedaulatan territorial laut adalah 12 mil ditarik dari garis tepi pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. (Wirawan & Subekti, 2012, p. 27) Tiongkok dianggap inkonsisten terhadap konvensi tersebut karena faktanya adalah Tiongkok telah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS, tercatat sebagai bagian tatanan hukum internasional Tiongkok harus mematuhi UNCLOS tersebut. (Nankivell, 2016) Sengketa kian memanas sejak Tiongkok mengumumkan klaim penuh atas Laut China Selatan tahun 2010. Hal ini juga direspon oleh Filiphina yang mengajukan gugatan kepemilikan wilayah Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (*The Permanent Court of Arbitration*). Pemerintah Filiphina pada tahun 2013 mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional yang mengenai ketidaksesuaian tindakan Tiongkok terhadap UNCLOS III 1982. Filiphina menginginkan PBB bertindak tegas bahwa klaim yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan adalah illegal. Dua tahun setelahnya PBB mengabulkan permintaan Filiphina untuk tidak memberikan hak dan pembenaran atas tindakan klaim Laut China Selatan oleh Tiongkok karena tidak sesuai dengan UNCLOS III 1982 pada tahun 2015. Walaupun putusan PBB tidak diindahkan oleh Tiongkok, namun putusan tersebut memberikan kekuatan baru negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh klaim Tiongkok. Keputusan PBB sangat penting mengingat klaim Laut China Selatan yang berbentuk U oleh Tiongkok tidak memiliki garis koordinat

yang jelas. Hal inilah yang menambah kompleksitas persengketaan Laut China Selatan. (Roza, 2016)

Dari segi militer, persengketaan Laut China Selatan semakin rumit karena Tiongkok menggunakan kekuatan militernya demi mempertahankan klaim penuh atas sebagian besar Laut China Selatan. Sesungguhnya sentimen militer yang ada di Laut China Selatan telah lama terjadi, tahun 1988 pasukan Angkatan Laut PLA Tiongkok pernah terlibat interaksi langsung dengan pasukan Angkatan Laut Vietnam. Bentrokan terjadi ketika pasukan Angkatan Laut PLA Tiongkok berupaya untuk mengambil alih pulau tak berpenghuni yang ada di kepulauan Spratly bagian barat dan Fiery Cross. (Nankivell, 2016) Diketahui pada tahun 2014 Tiongkok mulai membangun 7 fitur dalam upayanya mendirikan pangkalan militer di kepulauan Spratly. Menurut analisis pakar *Centre for International and Strategic Studies* yang ada di Washington dan Asia mengungkapkan bahwa Tiongkok tengah membangun pangkalan udara sepanjang 3 km di kepulauan Spratly yang dapat menampung pesawat pembom jarak jauh seri H-6 milik Tiongkok. Upaya lain yang dilakukan Tiongkok dalam mengukuhkan klaimnya atas Laut China Selatan adalah dengan memperluas Gaven-Riff di utara kepulauan Spratly hingga seluas 115.000 meter persegi sejak bulan Maret 2014. Tidak hanya itu, Tiongkok juga membangun landasan pacu militer di Johnson South Reef, memperluas Hughes-Riff seperti yang dilakukan di Gaven Riff, dan membangun pangkalan di Mischief-Riff yang hanya berjarak 135 km dari pulau terluar Filipina. (Freund, 2015) Tabel berikut akan mendeskripsikan daerah buatan dan infrastruktur dalam 7 fitur sebagai upaya Tiongkok memperluas kepulauan Spratly menjadi kepentingan nasionalnya.

Table 4. 1 Penciptaan Lahan Tiongkok di Kepulauan Spratly tahun 2015

Fitur	Daerah Buatan	Infrastruktur		
		Udara	Aset Tanah	Laut
Fiery Cross	0,96 km ²	Landasan Udara	Stasiun Utama	Pelabuhan
Subi	0,96 km ²	Landasan Helikopter/ Landasan Udara	Stasiun	-
Mischief	0,96 km ²	-	Stasiun	Pangkalan Angkatan Laut Masa Depan
Cuarteron	0,1 km ²	Landasan Helikopter X2	Komunikasi & Radar	-
Gaven	0,1 km ²	Landasan Helikopter X2	Anti-Udara	Platform Pasukan
Hughes	0,96 km ²	Landasan Helikopter Sudah Ada	Anti-Udara	Pelabuhan
Johnson South	75.000 m ²	Landasan Helikopter X2	Komunikasi & Radar	Pelabuhan Kecil

Sumber: <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>

Pada gambar di bawah juga semakin memperlihatkan bagaimana sepak terjang Pemerintah Tiongkok dalam memperkuat klaimnya terhadap Laut China Selatan. Pada Mei 2015 kamera milik pesawat pengintai Amerika Serikat menangkap aktivitas kapal pengeruk milik Tiongkok sedang beroperasi di dekat Mischief Reef di kepulauan Spratly.

Gambar 4. 8 Aktivitas Kapal Pengeruk Tiongkok di Kepulauan Spratly



Sumber: <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>

Dari sudut pandang politik, secara historis wilayah Laut China Selatan dari awal hingga saat ini tidak dimiliki oleh pemerintahan manapun. Wilayah Laut China Selatan pertama kali di duduki oleh Jepang saat melangsungkan ekspansi wilayah pada Perang Dunia II. Sejak saat itu Jepang memiliki hak menggunakan seluruh area Laut Tiongkok Selatan secara eksklusif. Berakhirnya Perang Dunia II, tidak ada lagi otoritas yang menguasai Laut China Selatan secara resmi. Celah tersebut yang di gunakan beberapa negara di sekitar bahkan negara barat untuk melancarkan klaim wilayah terhadap Laut China Selatan. Terlebih dengan mengetahui potensi ekonomis dan strategis yang dimiliki oleh Laut China Selatan, negara-negara tersebut bersaing dalam mempertahankan klaim kepemilikan Laut China Selatan. (Nankivell, 2016)

Tiongkok menjadi satu-satunya negara pengklaim Laut China Selatan yang memiliki pangkalan militer berupa landasan udara di wilayah tersebut. Dari hasil pantauan *HIS Jane's Defense Weekly*, Tiongkok berhasil membangun pulau-pulau baru di atas karang di sekitar kepulauan Spratly yakni Fiery Cross reef, Gaven

Reefs, Johnson South reef, dan Hughes Reef. Dalam laporan tersebut pada tahun 2014 Tiongkok berhasil membangun pulau di Fiery Cross Reef sepanjang 3000 meter dan lebar 250 meter sebagai landasan udara di tengah perairan Laut China Selatan. Menyangkut pembangunan cakram-cakram militer Tiongkok di wilayah tersebut, Jepang dan negara-negara lain menilai Tiongkok tidak konsisten terhadap komitmennya menjaga stabilitas kawasan, sebaliknya, pembangunan tersebut semakin memperkeruh persengketaan yang terjadi (IAPD Forum, 2015)

Agresifitas Tiongkok juga ditunjukkan melalui rencananya membangun pembangkit listrik nuklir maritim yang diprediksikan akan dapat digunakan untuk mendukung operasi di kawasan Laut China Selatan. Pengadaan pembangkit listrik nuklir ini memiliki kapasitas menyediakan energi untuk menghidupkan mercusuar, peralatan, pencairan, penyelamatan dan fasilitas pertahanan Tiongkok di Laut China Selatan. Pemerintah Tiongkok memprediksi pembangunan pembangkit listrik nuklir tersebut akan jadi dan dapat dilakukan uji coba pada tahun 2018. Dengan demikian perlahan-lahan tapi pasti, jika tidak dihentikan maka Tiongkok dapat merubah status quo Laut China Selatan dan menguasai penuh wilayah tersebut. Hal ini akan semakin memperkuat posisi Tiongkok sebagai negara terkuat di Asia Timur khususnya, mengingat perairan seluas 1,2 juta mil yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Laut China Selatan adalah lalu lintas lebih dari 50% perdagangan dunia. (Aryani, 2016)

Pada kenyataannya, eskalasi konflik ini mempengaruhi tatanan stabilitas kawasan Asia Timur. Didukung dengan kapabilitas militer yang semakin kuat, Tiongkok cenderung ekspansif di Laut China Selatan. hal ini dibuktikan dengan

upaya pembuatan lahan baru dengan memperluas beberapa pulau yang ada di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Tiongkok yang agresif dan ekspansif ini telah meningkatkan status Tiongkok sebagai ancaman bagi Jepang yang benar-benar nyata di Asia Timur. Kompleksitas yang terjadi di dalam konflik Laut China Selatan mencapai titik puncak dengan melibatkan lebih dari empat aktor utama yang berada di wilayah tersebut. (Nankivell, 2016)

Di satu sisi negara-negara tersebut sama-sama saling memperebutkan hak kepemilikan atas kepulauan yang ada di Laut China Selatan demi memenuhi hasrat kepentingan nasional mereka. Di sisi lain pihak-pihak yang bersengketa sama-sama ingin merespon agresifitas Tiongkok yang berusaha merubah status quo kepemilikan Laut China Selatan, termasuk Jepang. Kondisi inilah yang menjadi tantangan pertahanan keamanan Jepang dalam bentuk *gray zone*. Persengketaan Laut China Selatan tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi damai, namun juga tidak dapat didefinisikan dalam keadaan perang. Ancaman yang ditimbulkan oleh konflik tersebut menjadi salah satu alasan Jepang akhirnya menyepakati revisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015. Skema dan mekanisme kerjasama baru yang diperbaharui dalam *Guidelines* 2015 akan membawa aliansi Jepang dan Amerika Serikat dalam bentuk *collective security* yang dapat menggabungkan kekuatan militer kedua negara untuk merespon agresifitas militer Tiongkok di Laut China Selatan.

B. Ancaman Kepemilikan Nuklir Korea Utara

Perhatian negara-negara terkait isu keamanan yang ada saat ini adalah berasumsi akan kemungkinan ancaman baru yang ditimbulkan oleh pengembangan

senjata nuklir. Ancaman ini menjadi nyata ketika dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata nuklir belum dapat diprediksikan secara akurat. Namun berkaca dari masa lalu, peristiwa peluncuran bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat memberikan sedikit gambaran dampak kehancuran yang akan ditimbulkan oleh senjata nuklir. Pada saat itu dua kota besar di Jepang langsung hancur luluh lantak, mematikan mobilitas masyarakat dan menghancurkan seluruh infrastruktur yang ada. Peristiwa tersebut terjadi 72 tahun silam dengan perkembangan teknologi masa itu Amerika Serikat dapat membuat senjata pemusnah massal. Seiring berkembangnya teknologi terkini yang semakin mutakhir, tidak dapat dibayangkan betapa ancaman benar-benar akan ditimbulkan dari perkembangan dan penggunaan senjata nuklir.

Di kawasan Asia Timur, tantangan isu keamanan yang dihadapi Jepang tidak hanya menyangkut agresifitas kekuatan militer Tiongkok di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Kekhawatiran Jepang juga muncul akibat adanya potensi kepemilikan dan pengembangan nuklir Korea Utara yang dapat menjadi ancaman keamanan Jepang serta stabilitas kawasan. Proliferasi nuklir Korea Utara bukan semata-mata untuk tujuan penelitian, namun seiring waktu nuklir Korea Utara dijadikan instrument persenjataan utama negara tersebut.

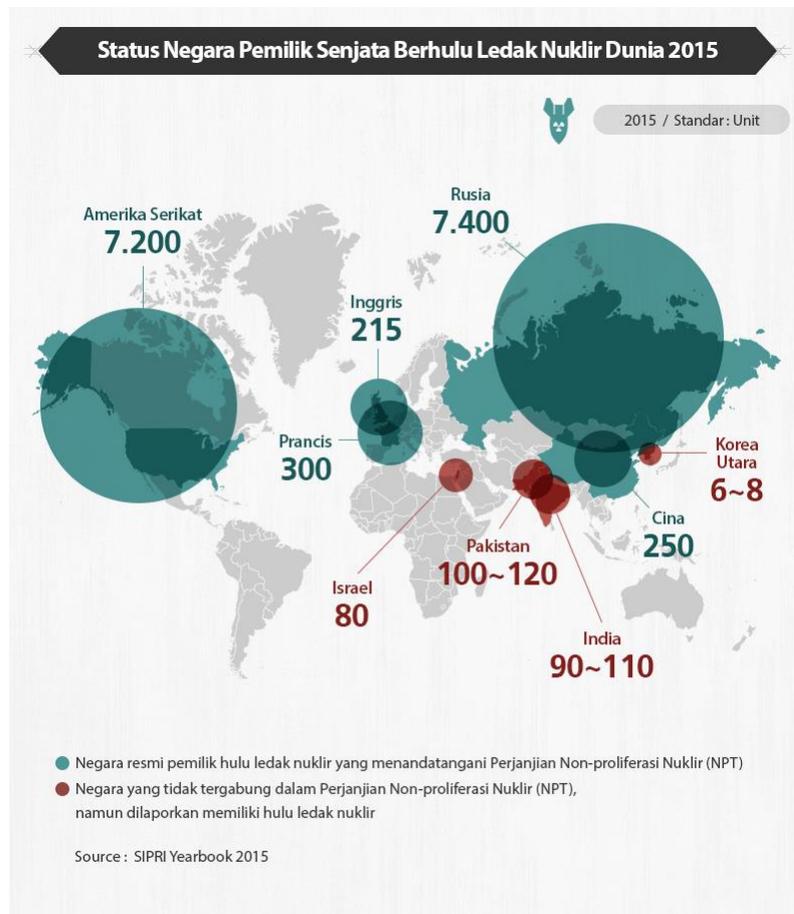
1. Kepemilikan Nuklir Korea Utara

Kepemilikan dan pengembangan nuklir sebagai persenjataan menjadi isu keamanan baru yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian dunia. Tercatat dalam laporan *Stockholm International Peace Research Institute* yang menyatakan bahwa di dunia ini terdapat sekitar 5.000 senjata nuklir yang siap digunakan kapan

saja. Tidak hanya itu, nuklir dalam status siaga penuh yang disimpan oleh negara pengembang nuklir sebanyak hampir 2.000 senjata nuklir. Negara-negara pengembang senjata nuklir yang terpublikasi memiliki lebih dari 20.500 hulu ledak termasuk milik delapan negara nuklir dunia – Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Perancis, India, Israel, Pakistan dan Rusia. Diprediksikan hanya cukup dengan 2 hulu ledak dapat meluncurkan senjata nuklir yang mengakibatkan kehancuran seluruh dunia. Hal inilah mengapa persenjataan berbasis nuklir menjadi ancaman yang cukup serius terhadap stabilitas dunia dan terlebih untuk negara-negara yang tidak mengembangkan senjata nuklir tersebut. Ancaman begitu nyata ketika senjata nuklir dapat diluncurkan dan diledakkan kapan saja yang dapat menjangkau baik dalam radius jarak pendek maupun jarak jauh. (Rachmat, 2015, p. 62)

Ketakutan dan kekhawatiran akan kepemilikan senjata nuklir ini dirasakan oleh negara-negara yang tidak mengembangkan nuklir. Hal ini menjadi rumit ketika negara tersebut terlibat konflik dengan negara yang memiliki nuklir atau hubungan dengan negara tersebut mengalami ketegangan. Keadaan *insecure* inilah yang menjadi ancaman terhadap terjaminnya keamanan suatu negara.

Gambar 4. 9 Status Negara Pemilik Senjata Berhulu Ledak Nuklir Dunia 2015



Sumber: http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/infographic/world_nuclear.htm?lang=i

Dari gambar diatas, di dapat informasi bahwa pada tahun 2015 terdapat sembilan negara yang memiliki hulu ledak nuklir. Lima negara pemilik hulu ledak nuklir sebagai negara yang menandatangani Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (*Non-Proliferation Treaty*) adalah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Tiongkok dan Inggris. Sedangkan empat negara lain tidak tergabung dalam Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (*Non-Proliferation Treaty*), namun keempat negara ini diketahui memiliki hulu ledak nuklir yakni Pakistan, India, Israel dan Korea Utara. (KBS World Radio, 2013)

Kekuatan dari senjata nuklir termasuk dalam golongan senjata pemusnah massal atau *Weapon of Mass Destruction* (WMP). Disebut sebagai senjata pemusnah massal dilihat dari dampak atau efek kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata tersebut. Dampak yang tidak dapat dihindari oleh obyek yang menjadi sasaran senjata nuklir tersebut kerusakan dan kehancurannya dalam skala besar. Senjata pemusnah massal didefinisikan oleh PBB dan *Central Intelligence Agencies* (CIA) sebagai berikut;

Menurut PBB, senjata pemusnah massal termasuk senjata dengan peledak atom, senjata dengan bahan radioaktif, senjata kimia dan biologi mematikan dan senjata lain yang dikembangkan di masa depan dengan karakteristik yang sebanding dalam kerusakan yang ditimbulkan dengan bom atom atau senjata-senjata yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut CIA, senjata pemusnah massal merupakan senjata yang memiliki kapabilitas untuk menghasilkan kerusakan dan telah digunakan dengan tujuan untuk membunuh manusia dalam skala besar. Dimana termasuk senjata nuklir, kimia, biologi dan radiologi tetapi tidak termasuk alat untuk membawa senjata tersebut dimana berarti terpisah dari bagian yang menjadi senjata. Senjata kimia dan biologi harus memenuhi jumlah tertentu untuk disebut sebagai senjata pemusnah massal (WMD), senjata kimia dan biologi yang digunakan dalam skala kecil tidak dapat dikategorisasikan sebagai WMD terkait dengan batas kerusakan yang diakibatkannya. (Rachmat, 2015)

Frank Barnaby dalam buku “Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin” yang ditulis oleh Angga Nurdin Rachmat mendefinisikan senjata nuklir sebagai berikut;

Senjata nuklir adalah senjata yang berdasarkan kepada fisi (tubrukan atau pemisahan atom) yang bergantung sepenuhnya pada reaksi berantai fisi untuk menghasilkan jumlah energi yang besar dalam waktu singkat yaitu sepersejuta detik karenanya senjata ini merupakan senjata yang memiliki efek ledakan yang kuat, sejauh ini senjata fisi ini menggunakan Uranium-235 atau Pu 239 sebagai bahan utama fisi.

Gambar 4. 10 Lambang Nuklir



Sumber: <https://homesolarenergy.com/disadvantages-of-nuclear-energy/>

Yang dikatakan sebagai senjata nuklir termasuk bom atom, bom hydrogen dan bom neutron. Ketiga jenis bom tersebut diklasifikasikan sebagai senjata nuklir karena merupakan senjata dengan menggunakan energi yang dikeluarkan dari reaksi nuklir seperti fisi dan fusi yang memiliki dampak kerusakan hebat. Komponen utama senjata nuklir adalah plutonium dan uranium. Walaupun telah dipastikan bahwa senjata nuklir masuk kedalam golongan senjata pemusnah massal atau *Weapon of Mass Destruction (WMD)* yang memiliki dampak kehancuran luar biasa, beberapa negara di dunia tetap ingin mengembangkan persenjataan berbasis nuklir – termasuk Korea Utara. Kepemilikan senjata nuklir memiliki keuntungan dan nilai strategis yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Secara strategis senjata nuklir memiliki kemampuan sebagai instrument penggetar atau *deterrence*, yang memberikan dampak secara psikologis kepada negara lain agar memiliki rasa ketakutan dan terancam oleh negara yang memiliki senjata nuklir tersebut. Dari segi politis, hanya lima negara Dewan Keamanan PBB yang diperbolehkan dan diizinkan melakukan pengembangan

senjata nuklir sebagai penjaga keamanan dunia. Oleh karenanya, negara-negara lain seperti Korea Utara, India dan Pakistan berupaya mengembangkan senjata nuklir agar kekuatan mereka dapat disejajarkan dengan negara “*the big five*” tersebut. Suatu negara hanya butuh sebuah senjata nuklir saja dapat digunakan untuk menghadapi kekuatan sebanyak 1000 tank. Keuntungan ekonomis inilah yang menjadi bahan pertimbangan suatu negara termasuk Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir. (Rachmat, 2015)

Proliferasi nuklir untuk persenjataan yang menjadi sorotan dunia internasional saat ini adalah proliferasi nuklir Korea Utara. Program pengembangan nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1950-an dengan bantuan Uni Soviet untuk dikembangkan sebagai sumber energi. Pada tahun 1969 informasi intelejen Tiongkok mendapati bahwa Korea Utara meningkatkan status pengembangan nuklir menjadi pengembangan senjata nuklir. Dengan adanya bantuan ahli dari Tiongkok dan Rusia, Korea Utara berhasil melangsungkan program pengembangan senjata nuklir ditujukan untuk kepentingan militer dan persenjataan. (Dema, 2017)

Gambar 4. 11 Daerah Fasilitas Pengembangan Nuklir Korea Utara



Sumber:

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/nucleus/nucleus_facilities.htm?lang=i

Gambar diatas memberikan informasi atas beberapa titik daerah yang dicurigai oleh beberapa pengamat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pengembangan nuklir Korea Utara yang selama ini dilakukan secara rahasia. Daerah fasilitas pengembangan nuklir tersebut antara lain Yongbyeon, Shinpo, Pyngyang, dan Taecheon yang terdapat reaktor nuklir di dalamnya. Kemudian Pyongsan, Suncheon, dan Backcheon sebagai pabrik pengolahan bahan bakar nuklir. (KBS World Radio, 2016)

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara dilakukan secara rahasia. Dunia internasional tidak memiliki informasi yang valid mengenai proses pengembangan senjata nuklir tersebut. Tidak diketahui pula berapa banyak nuklir yang dihasilkan

dalam proses pengembangan nuklir Korea Utara dan jumlah senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara saat ini. Ketidakpastian data dan informasi inilah yang menyebabkan kekhawatiran muncul di antara negara-negara di dunia terutama di sekitar Korea Utara – termasuk dalam hal ini adalah Jepang. Pada tahun 1974 Korea Utara masuk dan bergabung ke dalam suatu badan internasional yang mengurus tentang energi atom dan nuklir yakni Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency-IAEA*). Keanggotaan Korea Utara di IAEA tersebut secara otomatis memberikan izin IAEA untuk masuk ke Korea Utara untuk memantau aktivitas pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Setelah Rusia meyakinkan bahwa pengembangan senjata nuklir Korea Utara ditujukan sebagai sumber energi terutama sumber listrik, kemudian pada tahun 1985 masyarakat internasional melalui PBB berhasil memaksa Korea Utara untuk menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons-NPT*). (Dema, 2017)

Selang setahun dari penandatanganan NPT, Korea Utara menghidupkan reaktor nuklir Yongbyon pada tahun 1986. Di Yongbyon aktivitas pengembangan nuklir seperti pengayaan uranium dan produksi plutonium untuk dijadikan sebuah senjata dilakukan oleh Korea Utara. Setelah berhasil mengoperasikan reaktor nuklir Yongbyon, pada tahun 1993 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari kesepakatan NPT dan tidak bersedia lagi memberikan informasi rincian pengembangan senjata nuklirnya. Amerika Serikat berhasil mengajak Korea Utara untuk menyepakati sebuah perjanjian "*Agreed Framework*" yang berisi tentang keharusan Korea Utara menghentikan pengembangan program nuklirnya selama ini

pada tahun 1994. Namun pada tahun 1998 Amerika Serikat mendapati Korea Utara kembali mengembangkan senjata nuklirnya secara rahasia. (Dema, 2017)

Aktivitas pengayaan uranium dan pengembangan teknologi plutonium kembali dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2002. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap “*Agreed Framework*” yang sebelumnya telah disepakati pada tahun 1994. Negara komunis tersebut menyatakan mundur kedua kalinya dari NPT tahun 2003 dan menyatakan akan melanjutkan pengembangan senjata nuklir sebagai hak sebuah negara. Korea Utara kembali menghidupkan sistem pengembangan senjata nuklir dan menyuruh pergi pengawas dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Sejak saat itu pula Korea Utara berhasil mengembangkan cadangan bahan nuklir yang disimpan sejak tahun 1994 sebanyak 8.000 batang nuklir menjadi *nuclear weapons-grade plutonium*. (Roza, 2016)

Tindakan inkonsisten Korea Utara menimbulkan kekhawatiran terhadap Jepang sebagai negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Jepang bersama Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Korea Selatan dan Korea Utara melakukan perundingan enam negara di Beijing pada Agustus 2003 guna meminta Korea Utara untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya. Namun dengan tegas Korea Utara menolak permintaan dalam diskusi enam negara tersebut dan akan terus berupaya mengembangkan senjata nuklir untuk kepentingan militer dan persenjataan. (Dema, 2017)

Dua tahun berikutnya tepatnya pada bulan Februari 2005, Korea Utara mempublikasikan secara resmi bahwa negara komunis tersebut menyatakan

memiliki senjata nuklir. Publikasi tersebut dilakukan secara terbuka dan menyampaikan pada masyarakat internasional bahwa Korea Utara tidak lagi ingin terlibat dalam dialog enam negara. Dengan melakukan berbagai macam cara, Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia dan Korea Selatan berupaya membujuk Korea Utara untuk memikirkan kembali keputusannya dalam pengembangan senjata nuklir. Diskusi enam negara mengusahakan Korea Utara untuk kembali bergabung dan menyepakati NPT. Di tahun yang sama, Korea Utara akhirnya menerima hasil keputusan dialog enam negara untuk membatalkan pengembangan senjata nuklir dan membongkar seluruh senjata nuklir serta fasilitas produksi nuklir milik Korea Utara. Dialog enam negara berhasil membawa kembali Korea Utara untuk bergabung dalam NPT dan memberikan peluang IAEA untuk kembali melakukan pengawasan terhadap perkembangan nuklir Korea Utara. (Dema, 2017)

Hal yang mengejutkan terjadi, tidak hanya mengembangkan senjata nuklir, namun Korea Utara mulai menunjukkan taring kekuatannya. Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklirnya pertama kali pada tahun 2006. Uji coba senjata nuklir Korea Utara tersebut berpotensi menjadi ancaman untuk Jepang. Tidak cukup sekali, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya sebanyak tiga kali hingga tahun 2015.

2. Ancaman Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara

Setelah Korea Utara berhasil membangun reaktor nuklir model Uni Soviet pertamanya pada tahun 1960 untuk tujuan penelitian di Yongbyeon. Sepuluh tahun berikutnya, Korea Utara telah berhasil membangun reaktor nuklir yang kedua pada tahun 1970. Lebih dari 30 tahun berhasil mengembangkan senjata nuklir, Korea

Utara melakukan uji coba peluncuran rudal yang mana jarak jangkauannya berkisar 1.700-2.200 km. (KBS World Radio, 2016)

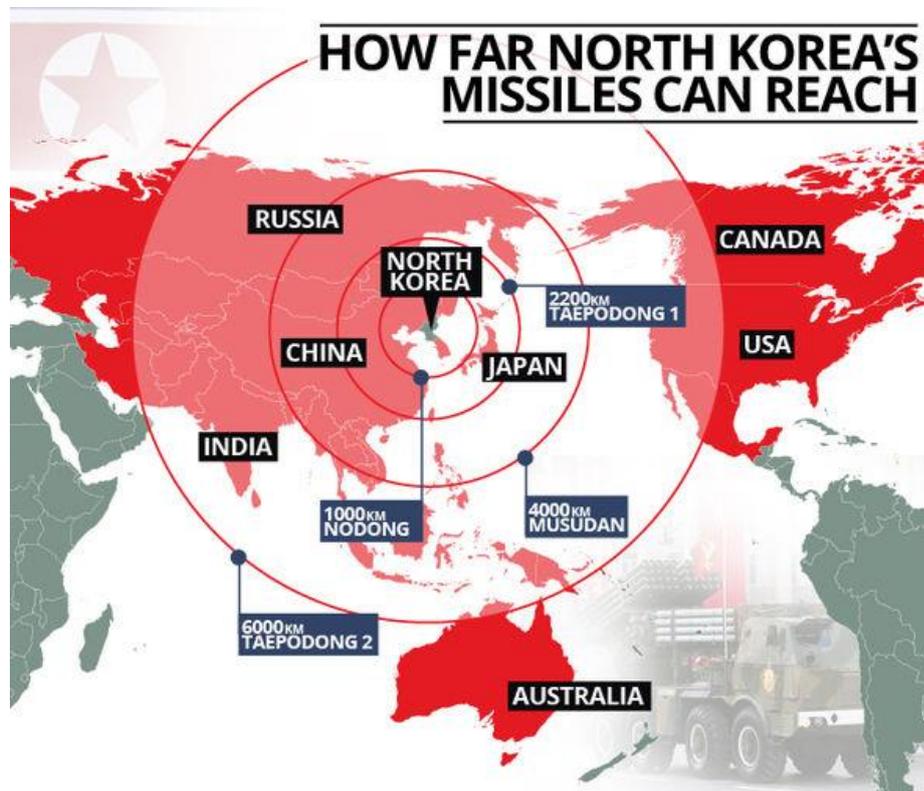
Korea Utara melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan NPT setelah sebelumnya terakhir kali negara komunis tersebut bergabung NPT pada September 2005. Peningkatan aktivitas pengembangan senjata nuklir berubah menjadi uji coba senjata nuklir menjadi ancaman nyata untuk Jepang. Secara geografis Jepang berada dalam satu kawasan dengan Korea Utara di Asia Timur. Jarak Jepang dan Korea Utara cukup dekat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dampak yang ditimbulkan dari uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara dapat dirasakan dan menjangkau Jepang. Uji coba senjata nuklir tersebut mengancam keamanan Jepang dan stabilitas kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, Jepang berusaha menghadapi ancaman tersebut dengan meningkatkan kerjasama pertahanannya dengan Amerika Serikat. Mekanisme kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat mencakup kerjasama *Ballistic Missile Defense* (BMD) yang mana senjata nuklir Amerika Serikat dapat mem-*back up* pertahanan Jepang dari ancaman senjata nuklir Korea Utara.

Korea Utara pertama kali menggelar uji coba senjata nuklirnya tahun 2006. Peristiwa ini langsung menjadi sorotan publik internasional atas tindakan tiba-tiba yang dilakukan oleh Korea Utara. Padahal sebelumnya Korea Utara telah menyatakan diri untuk bersedia menghentikan pengembangan senjata nuklir dan bergabung dalam NPT. Strategi yang dilakukan enam negara untuk membujuk Korea Utara ternyata gagal, sebaliknya uji coba senjata nuklir Korea Utara ini semakin memberikan kepercayaan diri terhadap kekuatan militer Korea Utara.

Korea Utara mengumumkan akan segera meluncurkan senjata nuklir. Jepang mengecam keras rencana uji coba senjata nuklir Korea Utara tersebut. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menyatakan bahwa uji coba senjata nuklir tersebut tidak dapat ditolelir karena akan mengancam perdamaian di kawasan Asia Timur. (Deutsche Welle, 2006)

Tepatnya pada 9 Oktober 2006 Korea Utara berhasil menggelar uji coba nuklir bawah tanah perdananya, yang diperkirakan kekuatannya kurang dari satu kiloton. Sebelumnya pada 5 Juli di tahun yang sama, Korea Utara melakukan uji coba menembakkan rudal balistik termasuk roket *Taepodong-2*. Namun uji coba penembakan roket *Taepodong-2* tersebut tidak berhasil sesuai rencana, walaupun demikian kantor berita sentral Korea Utara mengumumkan bahwa uji coba tersebut dinyatakan telah sukses. *Taepodong-2* merupakan rudal balistik tiga tingkat, namun sudah jauh lebih maju daripada *Taepodong-1*. Jangkauannya diperkirakan 5.000 km hingga 15.000 km dapat menjangkau Amerika Serikat yang berjarak 9.693 km dari Korea Utara sudah bisa menjadi target *Taepodong-2* (Artileri, 2013) Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara langsung mendapat respon keras oleh masyarakat internasional, termasuk Jepang. Jepang tidak sendiri dalam menghadapi Korea Utara, bersama negara aliansinya Ameirka Serikat, kedua negara ini berusaha untuk melawan ancaman Korea Utara. Pasukan militer Amerika Serikat langsung menerbangkan pesawat WC-135 “*Constant Phoenix*” dari pangkalan Amerika di Kadena, Jepang, yang punya perlengkapan khusus untuk mendeteksi bahan radioaktif dari udara selama sehari-hari. (Leksono, 2006)

Gambar 4. 12 Perkiraan Jangkauan Misil Korea Utara



Sumber: <http://www.express.co.uk/news/world/632178/North-Korea-hydrogen-bomb-test-map-potential-targets-nuclear-warhead>

Gambar diatas memberikan informasi perkiraan jangkauan peluncuran misil Korea Utara. Baik misil *Nodong*, *Taepodong-1*, *Musudan* dan *Taepodong-2* radius peluncurannya mencapai wilayah territorial Jepang. Ancaman dari misil Korea Utara terlebih lagi jangkauan maksimal terjauh nya dapat mencapai Amerika Serikat, sehingga kepemilikan nuklir Korea Utara ini dapat mengancam kedaulatan Jepang dan stabilitas serta keamanan global. (Batchelor, 2016)

Melalui berbagai pertimbangan, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1718 sebagai sanksi atas konsekuensi uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Sanksi tersebut merupakan sanksi senjata dan sanksi ekonomi. Dalam Resolusi 1718 enam pokok aturan yang harus ditaati oleh Korea

Utara dan negara anggota PBB lainnya. Pertama, Korea Utara dituntut untuk bersedia menghancurkan senjata nuklir termasuk senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang dimiliki Korea Utara. Kedua, negara-negara lain bertanggungjawab mengawasi dan mencegah adanya transaksi masuknya bahan-bahan pendukung pengembangan nuklir ke Korea Utara. Ketiga, negara-negara di dunia dituntut untuk membekukan aset keuangan seperti rekening perseorangan atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan program pengembangan nuklir Korea Utara. Keempat, resolusi ini memperbolehkan negara-negara lain melakukan pemeriksaan terhadap kargo yang membawa persenjataan untuk dibawa masuk ke Korea Utara. Kelima, resolusi ini tidak menggunakan ancaman militer secara langsung terhadap Korea Utara. Keenam, melalui resolusi ini PBB mengajak Korea Utara untuk bersedia duduk bersama “tanpa syarat” berdialog dengan enam negara untuk membicarakan program nuklirnya. (BBC Indonesia, 2006)

Pada tahun 2009 Korea Utara mengubah ideologi negara dari yang sebelumnya adalah komunis, sekarang Korea Utara menggunakan ideologi baru ideologi *Juche*. Ideologi ini merupakan pemikiran dari Kim Il-Sung yang dicetuskan sejak tahun 1955 yang berprinsip bahwa “manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu”. Dengan diberlakukannya prinsip tersebut sebagai ideologi atau landasan negara Korea Utara, maka tidak heran segala kebijakan Korea Utara sangat mengkhawatirkan negara-negara lain. (Deutsche Welle, 2016)

Dua tahun setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya, Korea Utara kembali meluncurkan roket 3 tingkat *Unha-3* yang gagal pada April

2009. Roket balistik *Unha-3* memiliki jangkauan lebih dari 9.600 km dan mampu membawa hulu ledak seberat 500-600 kg. Berdasarkan hasil simulasi, dengan jangkauan jauh roket Korea Utara tersebut, artinya roket ini bisa mencapai daratan Amerika Serikat, secara otomatis jangkauannya juga mencapai Jepang. (Artileri, 2012) Pada 25 Mei 2009 Korea Utara yang tercatat sebagai negara yang memiliki kurang dari 10 hulu ledak nuklir strategis di dunia ini menggelar uji coba nuklir bawah tanah yang kedua. Sebelumnya pada Februari 2007 Korea Utara sepakat untuk menghentikan uji coba nuklir dengan imbalan bantuan sebagai gantinya. Uji coba senjata nuklir kedua oleh Korea Utara merupakan tindakannya melanggar Resolusi 1718 yang dikeluarkan oleh DK PBB. Kemudian DK PBB mengeluarkan resolusi pada 12 Juni 2009. Resolusi ini memberlakukan sanksi ekonomi serta komersial lebih lanjut kepada Korea Utara dan mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara pasca-uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009. (Deutsche Welle, 2009).

Korea Utara kembali berhasil meluncurkan *Unha-3* di Dongchang-ri dan menempatkan satelit ke orbit pada Desember 2012. Komite Pertahanan Korea Utara menegaskan bahwa peluncuran roket jarak jauh dan pelaksanaan uji coba nuklir ditargetkan menuju Amerika Serikat. DK PBB mengeluarkan resolusi 2087 pada 22 Januari 2013 setelah Korea Utara meluncurkan roket pada 12 Desember 2012. Resolusi ini meminta Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya. Juga tidak boleh ada uji coba lebih lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lebih lanjut (KBS World Radio, 2013).

Gambar 4. 13 Unit Pencegat Rudal Patriot Advanced Capability-3



Sumber: <http://apdf-magazine.com/id/membangun-pertahanan-rudal-balistik/>

Beberapa anggota SDF Jepang menempatkan unit pencegat rudal Patriot Advanced Capability-3 di Departemen Pertahanan di Ward Shinjyuku, Tokyo pada April 2013 setelah Korea Utara mengumumkan ancaman untuk meluncurkan kembali sebuah rudal balistik miliknya. Penempatan penghalau rudal ini dilakukan Jepang sebagai upaya antisipasi terhadap uji coba nuklir yang dapat dilakukan oleh Korea Utara sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. (Indo-Asia Pasific Defense FORUM, 2016)

Tabel 4. 3 Uji Coba Persenjataan (berbasis nuklir) Korea Utara

Tahun	Tanggal dan Bulan	Uji Coba Persenjataan Korea Utara	Lokasi
2013	15 Maret	Peluncuran 2 rudal jenis KN	Perairan Laut Timur
	18 Mei	Penembakkan 6 artileri 300mm	
	19 Mei	Penembakkan 1 artileri 300mm	
	20 Mei	Peluncuran 2 rudal jenis KN	
	26 Juni	Penembakkan 4 artileri 300mm	
2014	21 Februari	Penembakkan 4 artileri 300mm	Perairan Laut Timur
	27 Februari	Peluncuran 2 rudal Scud	
	03 Maret	Peluncuran 2 rudal Scud	
	04 Maret	Penembakkan 4 artileri 300mm Penembakkan 3 artileri 240mm	
	16 Maret	Peluncuran 25 roket FROG	
	22 Maret	Peluncuran 22 roket FROG	
	23 Maret	Peluncuran 25 roket FROG	
	26 Maret	Peluncuran rudal jarak menengah Nodong	
	26 Juni	Penembakkan 3 artileri 300mm	
	29 Juni	Peluncuran 2 rudal Scud	
	02 Juli	Penembakkan 2 artileri 300mm	
	09 Juli	Peluncuran 2 rudal Scud	
	13 Juli	Peluncuran 2 rudal Scud	
	14 Juli	Penembakan 100 artileri 240mm, 122mm dan pluru artileri	
	26 Juli	Peluncuran 1 rudal Scud	
	30 Juli	Penembakkan 4 artileri 300mm	
	14 Agustus	Penembakkan 5 artileri 300mm	
	01 September	Peluncuran 1 rudal jarak pendek jenis baru	
06 September	Peluncuran 3 rudal jarak pendek jenis baru		

Sumber:

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/history/nucleus_history.htm?lang=i

Selama tahun 2013 dan 2014, Korea Utara secara agresif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan uji coba senjata nuklir di wilayah perairan Laut Timur. Sebanyak 28 kali uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara ini mengancam keamanan Jepang yang mana secara geografis, uji coba tersebut mengarah dan dapat menjangkau wilayah territorial Jepang. Korea Utara juga telah berhasil

melakukan uji coba 3 missil jarak pendek ke Laut Jepang. Uji coba ini dilakukan dari pantai timur Semenanjung Korea hingga 190 km yang akhirnya jatuh ke Laut Jepang pada tahun 2014. (VOA Indonesia, 2014)

Korea Utara menggantungkan kekuatan militer dan diplomasi pada senjata nuklir yang dimilikinya. Korea Utara mengembangkan nuklir menjadi senjata nuklir untuk kepentingan militernya bukan tanpa alasan. Kepemilikan nuklir Korea Utara ini dijadikan sebagai instrument diplomasinya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Selain optimalisasi sistem persenjataan yang didukung oleh senjata nuklir, Korea Utara memiliki alasan lain dalam mengembangkan senjata nuklir. Pertama, Korea Utara ingin tetap menjaga eksistensi negaranya yang selama ini terabaikan di antara negara-negara internasional. Dengan memanfaatkan efek penggetar yang dimiliki senjata nuklir, Korea Utara menjamin keberlangsungan rezimnya dalam memenuhi kepentingan nasional. Kedua, senjata nuklir digunakan untuk kepentingan ekonomi negara tersebut. Kepemilikan senjata nuklir memberikan keuntungan bagi Korea Utara yang dapat meminta konsesi atau bantuan dana jika Korea Utara diminta untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir, untuk bergabung ke dalam NPT, atau sekedar untuk mengikuti dialog enam negara. Ketiga, proliferasi senjata nuklir digunakan sebagai penunjang keamanan Korea Utara. Pada awalnya pengembangan nuklir diperuntukkan sebagai penelitian dan teknologi, namun dengan memanfaatkan nilai strategis dari senjata nuklir, sehingga Korea Utara memilih untuk menjadikan senjata nuklir sebagai instrument kekuatan militer dan persenjataannya. (Purwono & Zuhri, 2010)

Dari pemaparan diatas, terbukti bahwa tindakan Jepang menyepakati revisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015 merupakan bentuk respon terhadap perubahan sistem internasional yang terjadi di kawasan Asia Timur. Dalam lingkup eksternalnya, keputusan Jepang tersebut dilator belakangi oleh adanya potensi ancaman dan agresifitas Tiongkok dan Korea Utara. Kesimpulan yang lebih rinci akan disampaikan penulis pada bab terakhir dalam skripsi ini.